

ICOR SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI BASIS ARAH INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

ICOR of Agriculture Sector as a Base Direction of Regency/Municipality Agriculture Development in Indonesia

Adi Setiyanto

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No.70, Bogor 16161
E-mail: amihardjo@yahoo.com*

Naskah diterima: 29 Januari 2015

Direvisi: 3 Februari 2015

Disetujui terbit: 7 April 2015

ABSTRACT

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) is useful to estimate required investment according to targeted economic growth rate. This study aims to estimate ICOR of agriculture sector by regency/municipality in Indonesia. Secondary data used in this study come from institutions at the central, provincial, and regency/municipality levels from 2008 to 2012. The ICORs range from 2.65 to 4.97 with average food crop, horticulture, estate crop, and livestock subsectors are each of 3.22, 3.40, 3.20 and 3.23. Total regencies/municipalities classified as high and medium are 73.24 percent in food crop subsector, 81.09 percent in horticulture subsector, 80.89 percent in estate crop subsector, 81.49 percent in livestock subsector, and 70.63 percent for agricultural subsector. Implications of this study are: (i) central and regional governments need to collaborate in order to determine focused investment and to improve regional investment; (ii) it is necessary to estimate investment by subsector in all regencies/municipalities based on each targeted economic growth rate; and (iii) related first echelons in the Ministry of Agriculture along with regency/municipality governments could collaborate to determine focused subsector to achieve targeted growth rates.

Key words: *ICOR, agriculture sector, regency, municipality, economic, growth, investment, efisiensi*

ABSTRAK

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat digunakan untuk menghitung besaran target kebutuhan investasi yang diperlukan berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Kajian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai ICOR sektor pertanian menurut kabupaten/kota seluruh Indonesia dan menghitung jumlah kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi efisiensi tinggi, sedang, dan rendah dari nilai ICOR yang dimiliki. Kajian menggunakan data sekunder tahun 2008–2012 yang bersumber dari lembaga-lembaga terkait baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan kisaran nilai ICOR pada masing-masing kabupaten/kota adalah antara 2,65 hingga 4,97 dengan rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sektor pertanian secara berurutan adalah 3,22, 3,40, 3,20, dan 3,23. Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori efisiensi relatif tinggi dan sedang mencapai 73,24 persen pada subsektor tanaman pangan, 81,09 persen pada subsektor hortikultura, 80,89 persen pada perkebunan, 81,49 persen pada subsektor peternakan, dan 70,63 persen untuk sektor pertanian. Hasil analisis ini berimplikasi di antaranya pada: (1) pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkoordinasi kebijakan untuk memberikan fokus investasi pada subsektor atau sektor pertanian dalam rangka meningkatkan investasi di daerah baik yang bersumber dari investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) perlu dilakukan perhitungan kebutuhan investasi menurut subsektor dan masing-masing pelaku investasi pada seluruh kabupaten/kota setelah sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan; dan (3) unit-unit eselon I terkait di Kementerian Pertanian dapat melakukan koordinasi penentuan fokus utama subsektor dan kabupaten/kota untuk menyandingkan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan investasi dapat dilakukan bersama-sama.

Kata kunci: *ICOR, sektor pertanian, kabupaten, kota, pertumbuhan ekonomi, investasi, efisiensi*

PENDAHULUAN

Setelah periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) periode 2009–2014 berakhir, pembangunan pertanian memasuki periode baru, yaitu periode Kabinet Kerja (KK) tahun 2014–2019. Dalam era KK dilakukan perubahan, yaitu akan dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada akhir tahun 2015. Pada periode KK akan terjadi perubahan di mana periode pemerintahan pusat dan daerah akan seiring dari sisi waktu. Setelah Pemilukada selesai dilaksanakan maka kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terpilih akan menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan dan periode lima tahun ke depan atau periode 2015–2020. Dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut akan tercantum target-target yang akan dicapai. Salah satu target yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi selama periode lima tahun tersebut.

Hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan pertanian periode 2004–2014 yang dilakukan oleh Setiyanto *et al.* (2014) menunjukkan bahwa pembangunan pertanian periode 2004–2014 berjalan tidak efisien dan menunjukkan kinerja semakin menurun. Efisiensi yang rendah dan penurunan kinerja terjadi baik pada subsektor maupun pada komoditas strategis dan unggulan yang menjadi fokus utama pembangunan pertanian. Namun, meskipun dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan ketidakpastian dan kecenderungan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) karena pengurangan subsidi, pembangunan pertanian ke depan memiliki prospek dan peluang yang baik. Pada periode 2015–2019, pembangunan pertanian dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional jika dilakukan perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi. Sumber pertumbuhan dan peningkatan daya saing terjadi baik dari sisi peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan nilai tambah dan devisa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada periode tersebut, sektor

pertanian tetap berpeluang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dengan tantangan yang sangat berat, yaitu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi.

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kabupaten/kota merupakan basis pembangunan utama di daerah. Menurut Adisasmita (2010), setiap daerah perlu menempuh kebijakan yang sesuai karakteristik spesifik masing-masing daerah. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena dalam kenyataannya, setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga memiliki peluang dan kapasitas yang berbeda untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dan pencapaian target pembangunan pertanian yang ditetapkan. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi pertanian dibutuhkan investasi. Nilai target kebutuhan investasi tersebut dihitung berdasarkan nilai *incremental capital output ratio* (ICOR). Dalam era otonomi dan desentralisasi, perhitungan perkiraan kebutuhan investasi haruslah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perhitungan nilai ICOR untuk setiap kabupaten/kota sangat diperlukan untuk menentukan arah investasi agar pembangunan pertanian pada periode mendatang berjalan lebih efisien dan beberapa penyebab rendahnya efisiensi dan menurunnya kinerja pembangunan pertanian periode 2004–2014 dapat diatasi.

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam perekonomian nasional dan daerah, dan dinilai banyak ahli memiliki kemampuan untuk memadukan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai pemerataan pertumbuhan pada setiap wilayah kabupaten/kota. Perkiraan kebutuhan investasi tidak hanya dihitung secara nasional, namun juga perlu dilakukan pada setiap kabupaten/kota. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015–2019 (Kementerian Pertanian, 2014), kebutuhan investasi periode 2015–2019 telah dihitung secara nasional. Nilai ICOR dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Penelitian mengenai ICOR pertanian daerah

telah dilakukan seperti oleh Anwar *et al.* (2010) untuk Kabupaten Maros, Rahmawati *et al.* (2011) untuk Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Semarang (2011) untuk Kabupaten Semarang, BPS Kabupaten Situbondo (2012) untuk Kabupaten Situbondo, BPS Kabupaten Banyuwangi (2012) untuk Kabupaten Banyuwangi, Astrini (2013) untuk Provinsi Jawa Timur, Ilham (2013) untuk Kota Tebing Tinggi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi (2014) untuk Kabupaten Banyuwangi, dan Saleh (2014) untuk Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, perhitungan nilai ICOR pada level provinsi dan kabupaten/kota secara komprehensif dan menyeluruh belum pernah dilakukan. Di samping itu, penentuan target pemenuhan kebutuhan investasi menurut provinsi dan kabupaten/kota juga belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perhitungan ICOR secara komprehensif seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan.

Perhitungan nilai ICOR sangat penting dan bermanfaat untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan mengenai seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Seharusnya perhitungan nilai ICOR dilakukan oleh Kementerian Pertanian di tingkat pusat dan oleh instansi berwenang dan terkait pembangunan pertanian di daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan selanjutnya berkoordinasi menetapkan kebijakan arah investasi sehingga sasaran dan kebutuhan investasi serta kebijakan yang ditempuh akan seiring dan sejalan antara pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Permasalahannya adalah hingga saat ini belum ditemukan satupun publikasi atau penelitian yang melakukan perhitungan nilai ICOR menurut sektor, subsektor, maupun provinsi dan seluruh kabupaten/kota secara komprehensif. Oleh karenanya, perhitungan nilai ICOR pada masing-masing kabupaten/kota untuk sektor pertanian sangat diperlukan. Sekalipun pada umumnya sektor pertanian masih dominan, tidak seluruh kabupaten/kota struktur perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Dengan demikian, diperlukan kebijakan dengan menentukan kabupaten/kota sebagai fokus utama dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan investasi dan pencapaian

target pertumbuhan ekonomi, sekaligus arah investasi yang perlu dilakukan. Dalam kajian ini perhitungan nilai ICOR dilakukan terhadap sektor pertanian dan subsektor yang ada di bawah Kementerian Pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan.

Nilai ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya nilai tambahan investasi baru yang merupakan perkiraan kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Dalam konteks ekonomi makro, ICOR merupakan salah satu metode untuk menghubungkan pertumbuhan penggunaan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi akibat penggunaan faktor produksi tersebut. Nilai ICOR juga dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal sebagai faktor produksi. Nilai ICOR merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi di suatu wilayah (Ambarita, 2012; Ilham, 2013; Trinh *et al.*, 2014; Sadeghi *et al.*, 2014; Saleh, 2014). Nilai ICOR dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDB atau PDRB (Sukirno, 2004) di mana semakin rendah angka ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien (Jhingan, 2003). Nilai ICOR dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam rangka peningkatan efisiensi dalam pembangunan (Trinh *et al.*, 2014; Sadeghi *et al.*, 2014; OECD, 2014). Oleh karenanya, melakukan klasifikasi kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik nilai ICOR akan membantu upaya peningkatan kinerja dan efisiensi pembangunan pertanian. Berdasarkan nilai ICOR yang dimilikinya setiap kabupaten/kota dapat menyusun kebijakan arah investasi apakah harus padat modal (*capital intensive*) ataukah tidak (*non-capital intensive*). Di samping itu, berdasarkan nilai ICOR yang dihasilkan akan diperoleh gambaran mengenai pendekatan pembangunan yang harus dilaksanakan, yaitu apakah dengan pendekatan sektoral secara utuh yang mencerminkan kewilayahan, pendekatan subsektor atau komoditas dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk (1) memperkirakan nilai ICOR sektor pertanian menurut kabupaten/kota seluruh Indonesia (497 kabupaten/kota) dan (2) melakukan klasifikasi tingkat efisiensi investasi kabupaten/kota berdasarkan nilai ICOR yang dimiliki oleh masing-masing dan merumuskan arah kebijakan investasi berdasarkan klasifikasi nilai ICOR yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan hasil kajian pemerintah pusat, Kementerian Pertanian maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dapat (1) menentukan arah kebijakan investasi sektor pertanian, (2) memperkirakan kebutuhan investasi berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian yang ditetapkan, dan (3) menentukan arah investasi pembangunan pertanian secara lebih efisien dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas sekaligus merata.

Kajian ini berguna untuk menyediakan nilai ICOR dalam menentukan perkiraan besaran kebutuhan investasi sektor pertanian menurut kabupaten/kota maupun provinsi. Mengingat nilai ICOR juga dapat menunjukkan tingkat efisiensi, maka hasil dari kajian ini juga berguna untuk memperkirakan tingkat efisiensi perekonomian dalam hal ini sektor pertanian pada masing-masing kabupaten/kota. Kegunaan selanjutnya adalah berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang menjadi fokus utama ini, Kementerian Pertanian dapat menyusun target kebutuhan investasi dari dua sisi, yaitu akumulasi kebutuhan investasi secara *bottom up* dan disandingkan dengan kebutuhan yang dihitung secara nasional (*top down*). Pemerintah pusat maupun daerah dapat menentukan arah kebijakan investasi bagi pembangunan pertanian secara lebih efisien dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas sekaligus merata.

METODE PENELITIAN

Kerangka Teoritis

Konsep investasi

Mengacu pada konsep Harrod-Domar (Harrod, 1939; Domar, 1946) yang mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap

output, maka perhitungan ICOR sangat dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku, dan sebagainya. Berdasarkan konsep ini, nilai yang diperhitungkan dalam investasi mencakup (1) pembelian barang modal baru, (2) pembuatan/perbaikan besar barang yang sifatnya menambah umur atau meningkatkan kemampuan, (3) penjualan barang modal bekas, dan (4) perubahan stok. Nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal dan perbaikannya, serta nilai perubahan stok barang dikurangi penjualan barang modal. Rumusnya dalam bentuk matematis adalah sebagai berikut:

$$I = B + P + R - S \quad (1)$$

di mana:

- I = investasi
- B = pembelian barang modal baru, termasuk pematangan tanah
- R = perbaikan barang modal
- P = perubahan stok
- S = penjualan barang modal bekas

Dalam beberapa kasus perhitungan, perubahan stok sering diabaikan karena angkanya yang relatif tidak tersedia dengan baik dan selalu berubah-ubah, dan diperkirakan sebagai residual dengan pendekatan perhitungan PDB atau PDRB menurut lapangan usaha dikurangi dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (BPS, 2012).

Menurut konsep ekonomi nasional yang mengacu pada *system of national account* (European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, and World Bank, 2009), investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun t dikurangi dengan stok kapital pada tahun $t-1$ sehingga setiap terjadi penambahan kapital (modal) selalu dianggap

sebagai investasi dan besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya PMTB yang mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Investasi juga mencakup perbaikan barang modal yang mengakibatkan menambah umur pemakaian atau meningkatkan kemampuan barang modal tersebut, dikurangi dengan penjualan barang modal bekas.

Investasi dapat dirinci menurut sektor misalnya sektor pertanian, penggalan, industri, dan sebagainya. Investasi juga dapat dikelompokkan menurut institusi yang melakukan investasi seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan rumah tangga atau masyarakat. Investasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, merupakan pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik dimasukkan ke masing-masing sektornya. Investasi yang ditanamkan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah sendiri tidak termasuk dalam investasi sektor yang dilakukan oleh pemerintah namun dimasukkan investasi pemerintahan umum. Investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan rumah tangga atau masyarakat merupakan penanaman modal baru oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan produksi dan akumulasi stok barang berkaitan dengan antisipasi terhadap kondisi perekonomian makro.

Konsep output

Berdasarkan konsep United Nations (1968), Harrod (1939), dan Domar (1946), output adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan atau pendayagunaan seluruh faktor produksi (seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan) dalam menghasilkan barang dan jasa. Hasil yang diperoleh di luar dari pemanfaatan barang modal tidak dimasukkan sebagai output. Dalam penghitungan ICOR, konsep output yang digunakan adalah nilai tambah bruto. Data mengenai kenaikan nilai tambah bruto ini diperoleh dari hasil penghitungan PDB untuk nasional dan PDRB

untuk daerah dan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

Konsep ICOR

Konsep ICOR mengacu kepada teori atau Model Harrod-Domar (Harrod, 1939; Domar; 1946), yang intinya menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapasitas produksi (ΔK) semakin tinggi pula tambahan output (ΔY) yang dapat dihasilkan. Koefisien ICOR tidak hanya ditentukan oleh investasi yang ditanamkan saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerapan dan perkembangan teknologi dalam proses produksi. Secara sederhana ICOR dinyatakan sebagai rasio antara pertambahan modal (investasi) terhadap tambahan output, atau dinotasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \Delta K / \Delta Y \quad (2)$$

di mana:

ΔK = investasi atau penambahan kapasitas produksi

ΔY = pertumbuhan output

Mengingat tambahan output tidak hanya disebabkan oleh investasi yang ditanamkan, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, seperti tambahan tenaga kerja dan kemajuan teknologi, sementara dalam penerapannya untuk menghitung ICOR dipakai asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, maka faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian seluruhnya berupa data sekunder dengan rentang data tahun 2008–2012. Jenis data yang digunakan di antaranya: (1) data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Kementerian Keuangan; (2) data Perkembangan Investasi Nasional yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) dan Perkembangan Investasi Daerah yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD); (3) data Tinjauan Perekonomian Daerah, Hasil Perhitungan PDRB, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan Desa, data hasil survei dan sensus dan publikasi statistik lain yang bersumber dari BPS pusat maupun daerah; (4) data Statistik Pertanian yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian; dan (5) data lain yang relevan dari sumber lain yang terkait. Total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal dan perubahan stok. Konsep output yang digunakan dalam penghitungan ICOR adalah nilai tambah bruto yang diperoleh dari hasil penghitungan PDRB yang telah dipublikasikan BPS pusat dan daerah.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Perhitungan stok kapital

Berdasarkan BPS Kabupaten Bandung (2008) dan BPS Provinsi Sumatera Barat (2008), perkiraan stok kapital dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung, yang dikenal dengan *perceptual inventory model* (PIM). Model ini mengestimasi stok kapital berdasarkan besarnya PMTB. Secara konseptual, PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas dari luar negeri. Barang modal adalah alat yang digunakan untuk memproduksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Secara lebih rinci, PMTB pada dasarnya meliputi: (1) barang modal dalam bentuk konstruksi, baik berupa bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya seperti jalan raya, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, dan sebagainya; (2) barang modal dalam bentuk mesin dan peralatan baik untuk keperluan pabrik, kantor, maupun untuk usaha rumah tangga; (3) barang modal berupa alat transportasi; (4) biaya yang dikeluarkan untuk perubahan dan perbaikan besar barang modal seperti disebutkan di atas yang dapat meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian barang modal

tersebut; (5) pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan lahan baru tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, perluasan areal tanam tanaman tahunan kebun, buah dan hias, peremajaan dan penanaman tanaman tahunan; (6) pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan, dan sebagainya tetapi tidak termasuk pembelian ternak untuk dipotong atau dikonsumsi.

Perkiraan stok kapital dengan menggunakan model PIM ditentukan oleh akurasi data dasar mengenai PMTB dan asumsi tentang rata-rata umur berbagai jenis barang modal yang berkaitan dengan pola penyusutan karena stok kapital merupakan akumulasi jumlah PMTB setelah dikurangi dengan penyusutan. Data PMTB yang digunakan adalah PMTB atas dasar harga konstan karena dengan harga konstan fluktuasi perbedaan harga barang-barang modal dapat dieliminasi pada tahap estimasi, selanjutnya stok kapital dikonversikan menjadi atas dasar harga berlaku dengan menggunakan berbagai indeks harga perdagangan besar dari barang-barang modal. Untuk memperoleh nilai besarnya stok kapital menurut barang-barang modal menjadi stok kapital menurut sektor dilakukan perhitungan rincian banyaknya barang-barang modal tertentu yang digunakan oleh sektor-sektor tertentu. Perkiraan stok kapital pada suatu tahun tertentu berdasarkan model PIM yang paling sederhana dapat diperkirakan sebagai berikut (Ward, 1976):

$$SK_t^i = SK_{t-1}^i + PM_t^i - P_t^i \quad (3)$$

$$P_t^i = P_i SK_{t-1}^i \quad (4)$$

di mana:

SK_t^i = stok kapital menurut barang modal i pada tahun t

PM_t^i = pembentukan modal menurut barang modal i selama tahun t

P_t^i = penyusutan barang modal i selama tahun t .

Apabila persamaan (4) disubstitusikan ke persamaan (3), maka akan diperoleh persamaan (5) seperti berikut:

$$\begin{aligned} SK_t^i &= SK_{t-1}^i + PM_t^i - P_i SK_{t-1}^i \\ &= PM_t^i - (1 - P_i) SK_{t-1}^i \end{aligned} \quad (5)$$

Berdasarkan persamaan (5) ini dapat dilihat bahwa stok kapital pada suatu tahun tertentu akan sama dengan pembentukan modal pada tahun tersebut ditambah dengan stok kapital tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan penyusutan. Sebelum memperoleh nilai perkiraan stok kapital sesuai dengan persamaan (5), perkiraan besarnya penyusutan menurut barang modal harus dihitung terlebih dahulu. Perubahan stok dalam PDRB dimasukkan sebagai komponen PMTB agar model ekonomi makro $Y = C+G+I+X-M$ menjadi konsisten.

Dalam menghitung perkiraan stok kapital menurut jenis barang modal sektor dan subsektor dilakukan destinasinya menurut sektor dan subsektor (merinci jenis barang modal menurut sektor) terhadap stok kapital menurut jenis barang modal yang telah dihasilkan sebelumnya. Dengan menggunakan *guesstimate* atau perkiraan penggunaan terhadap pemakaian barang-barang modal pada tiap-tiap sektor dan subsektor akan diperoleh nilai pada sektor pertanian dan subsektornya, misalnya barang modal berupa irigasi dialokasikan ke sektor pertanian tanaman pangan, traktor roda 4 ke perkebunan, traktor roda 2 ke tanaman pangan, pemotong rumput ke peternakan, dan sebagainya.

Guesstimate dilakukan mengingat dalam data statistik tidak ada pemisahan penggunaan pemakaian barang-barang modal kecuali yang dapat ditelusuri dalam sistem pengadaan pemerintah. Dengan demikian, sekalipun di dalam faktanya terdapat pembangunan irigasi untuk ternak, penggunaan traktor roda 4 untuk mengolah tanah kebun rumput untuk pakan ternak, mengangkut dan memberikan pakan, dan mengangkut kotoran, hal ini tidak terdata dalam statistik. Oleh karena dalam sistem pengadaan pemerintah maupun swasta umumnya irigasi adalah untuk tanaman pangan, traktor roda 4 untuk perkebunan dan lainnya, maka di dalam pengalokasian berdasarkan subsektor dilakukan *guesstimate* berdasarkan hal ini.

Penghitungan perkiraan nilai penyusutan dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI untuk

penentuan pajak nomor 961 tahun 1983 dan 826 tahun 1984 (Departemen Keuangan, 1983 dan 1984). SK tersebut memuat penggolongan jenis harta tetap menurut tarif penyusutan, yaitu sebagai berikut: (1) golongan 1 (ternak): tarif penyusutan (TP) 50%; (2) golongan 2 (mesin-mesin dan peralatan): TP 25%; (3) golongan 3 (alat transportasi): TP 10%; dan (4) khusus golongan bangunan/konstruksi: TP 5%. Besarnya penyusutan yang didasarkan kepada SK Menteri Keuangan tidak mencakup subsektor dalam pertanian secara rinci sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan mengikuti perhitungan umum yang dilakukan dalam menghitung penyusutan sebagai berikut: (1) untuk jenis barang modal bangunan dan konstruksi: TP diperkirakan 5%; (2) untuk jenis barang modal mesin-mesin pertanian, alat komunikasi, irigasi, pembukaan lahan baru dan peralatan untuk keperluan profesional pertanian: TP 10%; (3) untuk jenis barang modal berupa perkakas pertanian, perabotan pertanian milik rumah tangga dan kantor perusahaan pertanian: TP 20%; (4) untuk jenis barang modal sepeda motor dan alat angkutan lainnya: TP 20%; (5) untuk jenis barang modal ternak dan tanaman kayu: TP 35%; dan (6) untuk jenis barang modal lain seperti alat listrik pertanian dan lain-lain: TP 10%.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa investasi adalah selisih stok kapital pada tahun ke- t dengan tahun sebelumnya ($t-1$) sebelum dikurangi dengan penyusutan. Berdasarkan konsepsi Pendapatan Nasional, jumlah PMTB mencerminkan investasi domestik secara fisik yang telah direalisasi pada suatu tahun tertentu. Pendekatan penghitungan investasi melalui konsepsi PMTB umumnya disebut sebagai pendekatan arus barang atau metode tidak langsung dalam menduga besarnya investasi karena masih perlu dibandingkan dan direkonsiliasi dengan data investasi yang ada dari berbagai instansi yang berkompeten mengenai data investasi, baik menurut sektor maupun menurut institusi pelaku usaha seperti investasi perusahaan yang dicatat oleh BKPM dan BKPMD. Berbeda dengan dasar perhitungan tarif pemerintah seperti telah diuraikan di atas, maka investasi perusahaan baik oleh BUMN, BUMD, Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan dapat diperoleh langsung dari laporan perkembangan realisasi investasi oleh BKPM dan BKPMMD.

Perhitungan ICOR

Setelah nilai investasi dan peningkatan output atas dasar harga konstan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengestimasi koefisien ICOR. Sesuai dengan persamaan (2), untuk mendapatkan suatu koefisien ICOR yang bisa mewakili keadaan selama satu periode tertentu digunakan beberapa alternatif perhitungan, tergantung kepada sifat investasi di setiap subsektor. Apabila investasi yang ditanamkan (I) pada tahun ke- t akan memberikan tambahan output (Y) pada tahun ke- t itu juga, maka digunakan rumus:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \quad (6)$$

Jika investasi yang ditanamkan pada tahun ke- t menimbulkan kenaikan output setelah s tahun (lag = s tahun), maka persamaan (6) di atas dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \quad (7)$$

Dalam praktiknya, data yang digunakan adalah data runtun berkala atau deret waktu (*time series*). Oleh karenanya, untuk memperoleh satu nilai ICOR yang mewakili digunakan dua pendekatan, yaitu metode akumulasi dan metode standar (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2012). Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi didasarkan atas anggapan bahwa timbulnya peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai dengan t_n disebabkan karena adanya akumulasi investasi tahunan selama periode waktu yang sama. Dalam penerapannya, metode akumulasi menggunakan nilai rata-rata tertimbang sehingga koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Berkaitan dengan adanya masalah waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan output (*time lag*), maka secara matematis perhitungan dengan metode akumulasi ditulis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum_{t_1}^{t_n} I_t}{\sum_{t_1}^{t_n} (Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \quad (8)$$

Pada metode standar perhitungan dilakukan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode atau waktu t_1 sampai dengan t_n sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 sampai dengan t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu dengan jumlah tahun yang ada, atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai t_n . Perhitungan ICOR dengan metode standar menggunakan rata-rata sederhana. Penulisiannya dalam bentuk matematis perhitungan dengan metode rata-rata sederhana adalah sebagai berikut:

$$ICOR = 1/n \sum_{t_1}^{t_n} \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \quad (9)$$

Analisis data

Kajian ini menggunakan pendekatan metode akumulasi dengan nilai rata-rata tertimbang (persamaan 8), sehingga munculnya koefisien ICOR yang ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu dapat dihindari. Hasil analisis ICOR selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: (1) kategori I = nilai ICOR < rata-rata - 0,5*stdev = efisiensi tinggi; (2) kategori II = nilai ICOR rata-rata \pm 0,5*stdev = efisiensi sedang; dan (3) kategori III = nilai ICOR > rata-rata + 0,5*stdev = efisiensi rendah. Tidak ada teori dasar khusus dalam pengelompokan kategori tersebut. Hasil analisis selanjutnya disusun berdasarkan matriks seperti Tabel 1.

Metode klasifikasi sederhana ini mengikuti metoda pengklasifikasian kabupaten pada kajian penentuan peringkat dan kelayakan kabupaten/kota sebagai kawasan pertanian dan penilaian kelas kawasan pertanian menurut kabupaten/kota yang dikembangkan oleh Tim Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan 2013 (Biro Perencanaan, 2013a dan 2013b).

Pengelompokan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa semakin rendah nilai ICOR menunjukkan kondisi lebih efisien sehingga diperlukan investasi yang relatif lebih rendah dan tidak terlalu padat kapital untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu. Bagaimanapun juga anggaran pemerintah terbatas, sehingga harus dialokasikan secara bijaksana pada wilayah yang tepat. Di samping itu, pengembangan subsektor tentunya akan lebih efisien pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR subsektor relatif rendah dan juga nilai ICOR sektor pertanian yang relatif lebih rendah pula untuk menetapkan strategi apakah perlu padat kapital atau tidak.

Berdasarkan hasil analisis matriks pada Tabel 1, berkaitan dengan perencanaan makro pengembangan pertanian, pemerintah pusat dapat memilah prioritas pengembangan berdasarkan kombinasi mulai dari ICOR subsektor dan ICOR sektor pertanian efisien hingga kombinasi keduanya sama-sama memiliki efisiensi tinggi, jika dihadapkan pada kondisi kesulitan pemenuhan kebutuhan investtasi maupun ketesediaan anggaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Efisiensi investasi dapat dilihat dari berapa besar koefisien ICOR yang diperoleh. *World Economic Study* menjelaskan bahwa 70% negara berkembang memiliki rasio modal output antara 3 dan 4 (Jhingan, 2003). Rosenstein-Rodan dan Lewis (*dalam* Arsyad, 1988) memperkirakan bahwa rasio efisiensi investasi terletak antara 3 sampai 4. Artinya, bahwa investasi dikatakan efisien apabila nilai

ICOR yang diperoleh berada antara 3 dan 4. Apabila nilai ICOR semakin kurang dari 3 maka dapat dikatakan investasi tersebut sangat efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan apabila nilai ICOR melebihi 4 maka dapat dikatakan investasi tersebut semakin tidak efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini mencakup 497 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota ini ditentukan berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki publikasi secara konsisten pada publikasi BPS pusat. Unit analisis yang digunakan adalah kabupaten/kota dan kabupaten/kota hasil pemekaran dari 497 kabupaten/kota datanya masih tergabung atau digabung jika sudah terpisah dengan kabupaten induknya. Pada perhitungan level provinsi data masing-masing kabupaten/kota dijumlahkan sesuai provinsinya, dan selanjutnya nilai ICOR nasional menggunakan data akumulasi dari data masing-masing provinsi. Hal yang sama juga dilakukan untuk mengitung nilai ICOR sektor pertanian. Data yang digunakan merupakan akumulasi dari data masing-masing subsektornya. Metode perhitungan untuk level provinsi dan nasional adalah sama dengan perhitungan dilakukan pada masing-masing kabupaten/kota. Data sektor pertanian yang dimaksud dalam kajian ini adalah sektor pertanian dalam arti sempit dan di bawah Kementerian Pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan.

Tabel 1. Matriks jumlah kabupaten berdasarkan kombinasi nilai ICOR subsektor dan sektor pertanian atau antarsubsektor dalam sektor pertanian

		ICOR sektor pertanian/subsector lainnya dalam sektor pertanian		
		I	II	III
ICOR subsektor tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan	I	Jumlah kabupaten I, I	Jumlah kabupaten I, II	Jumlah kabupaten I, III
	II	Jumlah kabupaten II, I	Jumlah kabupaten II, II	Jumlah kabupaten II, III
	III	Jumlah kabupaten III, I	Jumlah kabupaten III, II	Jumlah kabupaten III, III

Keterangan: Kategori I = efisiensi tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai ICOR Subsektor dan Sektor Pertanian Menurut Provinsi

Hasil analisis perkiraan nilai ICOR subsektor dan sektor pertanian pada setiap kabupaten/

kota tercantum pada Lampiran 1. Berdasarkan Lampiran 1 posisi tingkat efisiensi pada setiap kabupaten/kota dapat diketahui dan dapat diketahui bagaimana arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan mereka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

Tabel 2. Nilai ICOR subsektor dan sektor pertanian provinsi dan nasional berdasarkan hasil analisis ICOR kabupaten/kota, 2008–2012

No.	Provinsi	Tanaman pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3,14	3,21	2,99	2,95	3,18
2.	Sumatera Utara	3,15	3,27	3,12	3,09	3,19
3.	Sumatera Barat	3,13	3,43	3,28	3,17	3,23
4.	Riau	3,27	3,52	3,12	3,31	3,33
5.	Kepulauan Riau	3,18	3,25	3,36	3,44	3,15
6.	J a m b i	3,24	3,35	2,97	3,27	3,32
7.	Sumatera Selatan	3,34	3,45	3,16	3,28	3,41
8.	Kep. Bangka Belitung	3,32	3,29	3,25	3,19	3,39
9.	Bengkulu	3,12	3,12	2,94	3,01	3,22
10.	Lampung	3,24	3,40	3,04	3,12	3,37
11.	DKI Jakarta	3,90	4,41	4,66	4,47	4,10
12.	Jawa Barat	3,05	3,61	3,43	3,19	3,37
13.	Banten	3,11	3,83	3,54	3,50	3,34
14.	Jawa Tengah	3,00	3,40	3,28	3,07	3,29
15.	DI Yogyakarta	3,13	3,57	3,29	3,21	3,42
16.	Jawa Timur	3,01	3,44	3,32	3,05	3,37
17.	Kalimantan Barat	3,19	3,29	3,16	3,34	3,48
18.	Kalimantan Tengah	3,11	3,36	3,18	3,41	3,45
19.	Kalimantan Selatan	3,14	3,50	3,30	3,46	3,46
20.	Kalimantan Timur	3,31	3,32	3,06	3,35	3,35
21.	Sulawesi Utara	3,25	3,30	3,03	3,37	3,33
22.	Gorontalo	3,08	3,48	3,12	3,39	3,40
23.	Sulawesi Tengah	3,25	3,39	3,06	3,48	3,47
24.	Sulawesi Selatan	3,29	3,56	3,09	3,23	3,50
25.	Sulawesi Barat	3,36	3,46	2,91	3,34	3,46
26.	Sulawesi Tenggara	3,16	3,35	3,01	3,18	3,30
27.	Bali	3,10	3,44	3,02	3,18	3,33
28.	Nusa Tenggara Barat	3,32	3,49	3,19	3,15	3,49
29.	Nusa Tenggara Timur	3,21	3,34	3,06	3,22	3,37
30.	Maluku	3,13	3,11	3,04	3,15	3,18
31.	Maluku Utara	3,20	3,25	2,97	3,23	3,18
32.	Papua	3,41	3,38	3,36	3,29	3,40
33.	Papua Barat	3,42	3,41	3,42	3,31	3,35
	Indonesia	3,22	3,42	3,20	3,28	3,37

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

kota disajikan Lampiran 1. Secara terinci nilai ICOR dan kelompok berdasarkan kategori untuk sektor pertanian maupun subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan pada masing-masing kabupaten/

Tabel 2 memuat hasil analisis pada level provinsi. Pada perhitungan level provinsi data masing-masing kabupaten/kota dijumlahkan sesuai provinsinya, dan selanjutnya nilai ICOR nasional menggunakan data akumulasi dari provinsi. Hal yang sama juga dilakukan untuk

mengitung nilai ICOR sektor pertanian. Data yang digunakan merupakan akumulasi dari data masing-masing subsektornya. Metode perhitungan untuk level provinsi dan nasional adalah sama dengan perhitungan dilakukan pada masing-masing kabupaten/kota.

Pada periode 2008–2012, nilai ICOR subsektor berkisar antara 2,80 hingga 4,66, dan untuk sektor pertanian 3,14 hingga 4,06, di mana nilai ICOR terendah adalah subsektor tanaman pangan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yaitu 2,80 dan tertinggi adalah subsektor perkebunan di Provinsi DKI Jakarta yaitu 4,66; sementara, untuk sektor pertanian terendah pada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 3,14 dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 4,10. Nilai ICOR subsektor tanaman pangan nasional adalah 3,21, hortikultura 3,42, perkebunan 3,20, dan peternakan 3,28, serta sektor pertanian dengan keempat subsektor tersebut adalah 3,37. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai ICOR sektor pertanian dan masing-masing subsektor yang berada di bawah Kementerian Pertanian hampir keseluruhan adalah sekitar 3 hingga 4. Nilai tersebut menunjukkan nilai yang cukup efisien. Perbandingan antarsubsektor menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi adalah pada subsektor perkebunan. Nilai ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian memiliki prospek cukup baik untuk investasi, di mana setiap tambahan investasi Rp3,20 miliar akan menghasilkan nilai tambah bruto atau PDB sebesar Rp1 miliar.

Nilai ICOR yang dihasilkan pada penelitian ini menunjukkan angka yang relatif dapat diterima di mana hasil perhitungan dari penelitian lain menunjukkan nilai ICOR sektor pertanian berada pada kisaran sekitar nilai 3 hingga 4. Sebagai perbandingan nilai ICOR nasional dicontohkan pada hasil penelitian terhadap sektor perikanan PKSPL (1999), yang menyatakan bahwa nilai ICOR untuk sektor perikanan untuk periode 1999–2003 adalah berkisar antara 2,75–3,95; yang mengindikasikan bahwa subsektor ini mempunyai prospek yang cukup baik bagi investasi yang ditanamkan.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa tidak efisien untuk mengembangkan pertanian (dan seluruh

subsektor yang ada di dalamnya) di wilayah DKI Jakarta. Pada wilayah tertentu di provinsi lain menunjukkan membutuhkan investasi yang tinggi untuk mengembangkan pertanian (dan seluruh subsektor) sesuai karakteristik masing-masing wilayah provinsi. Hal ini sangat terkait dengan lahan, alat dan mesin pertanian, prasarana dan sarana pertanian, dan tingkat teknologi yang digunakan apakah pada modal atau tenaga kerja. Nilai ICOR yang rendah atau yang relatif efisien terjadi di wilayah yang selama ini merupakan basis tanaman pangan seperti Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada subsektor perkebunan. Namun demikian, pada hortikultura dan peternakan menunjukkan fenomena yang berbeda. Pada subsektor hortikultura di mana nilai ICOR yang relatif rendah dibanding rata-rata bukan pada wilayah basis. Pada subsektor peternakan tidak memiliki pola tertentu karena mengikuti karakteristik masing-masing wilayah, dan pada wilayah basis peternakan belum tentu memiliki nilai ICOR lebih rendah dibanding daerah nonbasis peternakan. Sebagai contohnya adalah Bengkulu memiliki nilai ICOR yang lebih rendah dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan Sulawesi Selatan sebagai daerah basis peternakan memiliki nilai ICOR yang lebih tinggi dari daerah nonbasis peternakan, misalnya Maluku. Berdasarkan hal ini diperoleh gambaran bahwa pada subsektor yang berbasis lahan yang relatif luas, yaitu tanaman pangan dan perkebunan, lahan, alsintan, dan infrastruktur merupakan faktor penentu nilai ICOR, sedangkan pada wilayah hortikultura sangat tergantung pada tingkat kepadatan modal yang digunakan. Pada wilayah peternakan nilai tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah.

Nilai ICOR Subsektor dan Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota

Nilai ICOR masing-masing subsektor dan sektor pertanian menurut kabupaten/kota menunjukkan rata-rata 3,19 untuk subsektor tanaman pangan, 3,40 untuk subsektor hortikultura, 3,20 untuk subsektor perkebunan,

3,23 untuk subsektor peternakan, dan 3,35 untuk sektor pertanian (Tabel 3). Nilai minimum (*min*) atau terendah ICOR subsektor tanaman pangan adalah 2,71 pada Kabupaten Indramayu; hortikultura 2,76 pada Kabupaten Malang; perkebunan 2,67 pada Kabupaten Mandailing Natal, peternakan 2,65 pada Kabupaten Bogor, dan pertanian 3,00 pada Kabupaten Simalungun dan Siak. Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki nilai ICOR yang paling efisien di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Nilai maksimum (*max*) atau tertinggi ICOR tanaman pangan 4,33 pada Kota Bandung; hortikultura 4,88 pada Kota Jakarta Timur; perkebunan 4,87 pada Kota Jakarta Timur; peternakan 4,97 pada Kota Jakarta Pusat, dan sektor pertanian 4,84 pada Kota Jakarta Timur. Kota-kota dan kabupaten tersebut memiliki nilai ICOR yang paling tidak efisien di antara kabupaten lainnya di Indonesia.

nilai antara 3 hingga 4, dan menunjukkan angka yang relatif tepat. Berdasarkan Lampiran Tabel 1, nilai ICOR subsektor tanaman pangan Kabupaten Banyuwangi 2,89 untuk subsektor tanaman pangan, 3,33 untuk subsektor hortikultura, 3,16 untuk subsektor perkebunan, 3,22 untuk subsektor peternakan dan untuk sektor pertanian yang mencakup keempat subsektor tersebut adalah 3,44. Sementara itu, nilai ICOR pertanian Kabupaten Bandung adalah 2,98 untuk subsektor tanaman pangan, 3,37 untuk subsektor hortikultura, 3,32 untuk subsektor perkebunan, 2,97 untuk subsektor peternakan dan 3,43 untuk sektor pertanian yang mencakup keempat subsektor tersebut.

Sebagai perbandingan kita dapat melihat hasil penelitian BPS (2012) di Kabupaten Banyuwangi, di mana nilai ICOR pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) pada periode 2009–2011 berkisar antara 2,47–3,06.

Tabel 3. Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kategori subsektor dan sektor pertanian berdasarkan nilai ICOR, 2008–2012

No.	Keterangan	Subsektor				Pertanian
		Tan. pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	
1.	Nilai ICOR					
a.	Min	2,71	2,76	2,67	2,65	3,00
b.	Max	4,33	4,88	4,87	4,97	4,84
c.	Rata-rata	3,22	3,40	3,20	3,23	3,38
d.	Stdev	0,26	0,36	0,39	0,34	0,23
e.	Kategori I	< 3,09	< 3,22	< 3,00	< 3,06	< 3,26
f.	Kategori II	3,09–3,35	3,22–3,58	3,00–3,90	3,06–3,39	3,26–3,50
g.	Kategori III	> 3,35	> 3,58	> 3,90	> 3,39	> 3,50
2.	Jumlah kabupaten					
a.	Kategori I	174	155	188	154	164
b.	Kategori II	190	248	214	251	187
c.	Kategori III	133	94	95	92	146
	Total	497	497	497	497	497
3.	Persen kabupaten					
a.	Kategori I	35,01	31,19	37,83	30,99	33,00
b.	Kategori II	38,23	49,90	43,06	50,50	37,63
c.	Kategori III	26,76	18,91	19,11	18,51	29,38
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Keterangan: Min = minimum, Max = maksimum, Stdev = standar deviasi, Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah

Hasil analisis menunjukkan bahwa kecuali pada kota-kota dan kabupaten tertentu pada subsektor tertentu, nilai ICOR pada hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan

Sementara itu, menurut BPS Kabupaten Bandung (2008) nilai ICOR sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) Kabupaten Bandung 2000–2007 adalah 2,75; pada periode

2000–2004 adalah 2,50 dan periode 2005–2007 adalah 9,01. Perubahan koefisien ICOR sektor pertanian di Kabupaten Bandung disebabkan oleh berkurangnya penambahan output yang terbentuk pada periode 2005–2007. Pada periode tersebut terjadi pergeseran musim di Kabupaten Bandung yang menyebabkan kegagalan panen hampir pada seluruh kegiatan pertanian, menyebabkan pembentukan modal pada sektor pertanian yang terjadi dalam periode tersebut menjadi tidak efisien. Hasil penelitian baik pada Kabupaten Banyuwangi maupun Bandung menunjukkan perbedaan nilai dibandingkan hasil BPS Kabupaten Banyuwangi (2012) dan BPS Kabupaten Bandung (2008) yang diduga adalah akibat perbedaan jumlah subsektor yang tercakup di dalamnya. Pada penelitian ini, cakupan subsektor hanya terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, sedangkan pada penelitian BPS Kabupaten Banyuwangi (2012) dan BPS Kabupaten Bandung (2008) sektor pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; peternakan; perikanan dan kehutanan. Nilai ICOR menurut subsektor terendah adalah subsektor peternakan yaitu 2,65 dan tertinggi adalah 4,97 juga untuk subsektor peternakan. Pada sektor pertanian nilai ICOR terendah adalah 3,00 dan tertinggi adalah 4,84. Rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sektor pertanian secara berurutan adalah 3,22, 3,40, 3,20, dan 3,23, serta 3,28. Rata-rata nilai ICOR subsektor perkebunan terendah dan tertinggi subsektor hortikultura. Hal ini menunjukkan bahwa investasi subsektor perkebunan adalah relatif yang paling efisien dan subsektor hortikultura adalah yang relatif paling tidak efisien dibanding subsektor lainnya dalam sektor pertanian.

Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi nilai ICOR masing-masing subsektor dengan sektor pertanian

Tabel 4 memuat rincian jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi nilai ICOR masing-masing subsektor dengan nilai ICOR sektor pertanian. Kombinasi ini memberikan arahan

fokus peningkatan investasi pada masing-masing subsektor dengan mengetahui bahwa nilai ICOR sektor pertanian pada kategori I+II. Pada subsektor tanaman pangan terdapat jumlah kabupaten/kota yang memiliki kombinasi subsektor nilai katagori I+II (dan ICOR sektor pertanian pada kategori yang sama sehingga menjadi kombinasi kategori I+I, I+II, II+I, dan II+II adalah 316 kabupaten/kota atau 63,58% dari total 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pada subsektor hortikultura adalah 342 kabupaten/kota atau 68,81% dan merupakan jumlah terbanyak dibanding subsektor lainnya, selanjutnya pada subsektor perkebunan 313 kabupaten/kota atau 62,98% dan subsektor peternakan adalah 315 kabupaten kota atau 63,38% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui upaya untuk mendorong peningkatan investasi sektor pertanian pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan nilai ICOR masing-masing subsektor dapat diarahkan pada subsektor yang memiliki kebutuhan investasi relatif rendah dan sedang. Hal ini sangat diperlukan mengejar pertumbuhan sektor pertanian sesuai yang diharapkan melalui fokus penggerakan investasi pada masing-masing subsektor.

Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 disusun berdasarkan pertimbangan apabila pemerintah mengharapkan tidak hanya satu subsektor saja yang dikembangkan pada masing-masing kabupaten/kota, namun mencakup satu subsektor sebagai fokus utama dan satu subsektor lainnya dalam rangka melakukan investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Berdasarkan Tabel 5, jumlah kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan investasi subsektor tanaman pangan dengan subsektor hortikultura yang berada pada kombinasi kategori I+I, I+II, II+I dan II+II adalah 317 kabupaten/kota atau 63,78%. Pada kombinasi subsektor tanaman pangan dengan perkebunan dengan kombinasi kategori yang sama adalah 304 kabupaten/kota adalah 304 kabupaten/kota atau 61,17% dan kombinasi subsektor tanaman pangan dan peternakan adalah 311 kabupaten/kota atau 62,58% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 4. Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi kategori subsektor dan sektor pertanian berdasarkan nilai ICOR, 2008–2012

Subsektor	Sektor	Pertanian			Jumlah	
	Keterangan	Kategori I	Kategori II	Kategori III		
Tanaman pangan	----- Jumlah kabupaten -----					
	Kategori I	78	79	16	173	
	Kategori II	73	86	32	191	
	Kategori III	7	48	78	133	
	Jumlah	158	213	126	497	
	----- Persentase (%) -----					
	Kategori I	15,69	15,90	3,22	34,81	
	Kategori II	14,69	17,30	6,44	38,43	
	Kategori III	1,41	9,66	15,69	26,76	
	Jumlah	31,79	42,86	25,35	100,00	
	Hortikultura	----- Jumlah kabupaten -----				
		Kategori I	94	61	1	156
Kategori II		47	140	63	250	
Kategori III		16	15	60	91	
Jumlah		157	216	124	497	
----- Persentase (%) -----						
Kategori I		18,91	12,27	0,20	31,39	
Kategori II		9,46	28,17	12,68	50,30	
Kategori III		3,22	3,02	12,07	18,31	
Jumlah		31,59	43,46	24,95	100,00	
Perkebunan		----- Jumlah kabupaten -----				
		Kategori I	78	87	25	190
	Kategori II	49	99	63	211	
	Kategori III	30	28	38	96	
	Jumlah	157	214	126	497	
	----- Persentase (%) -----					
	Kategori I	15,69	17,51	5,03	38,23	
	Kategori II	9,86	19,92	12,68	42,45	
	Kategori III	6,04	5,63	7,65	19,32	
	Jumlah	31,59	43,06	25,35	100,00	
	Peternakan	----- Jumlah kabupaten -----				
		Kategori I	63	73	18	154
Kategori II		75	104	72	251	
Kategori III		19	37	36	92	
Jumlah		157	214	126	497	
----- Persentase (%) -----						
Kategori I		12,68	14,69	3,62	30,99	
Kategori II		15,09	20,93	14,49	50,50	
Kategori III		3,82	7,44	7,24	18,51	
Jumlah		31,59	43,06	25,35	100,00	

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Keterangan: Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah

Tabel 5. Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi kategori subsektor tanaman pangan dan subsektor lainnya berdasarkan nilai ICOR, 2008–2012

Subsektor	Subsektor Keterangan	Tanaman pangan			Jumlah
		Kategori I	Kategori II	Kategori III	
Hortikultura		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	85	55	15	155
	Kategori II	78	99	70	247
	Kategori III	10	37	48	95
	Jumlah	173	191	133	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	17,10	11,07	3,02	31,19
	Kategori II	15,69	19,92	14,08	49,70
	Kategori III	2,01	7,44	9,66	19,11
	Jumlah	34,81	38,43	26,76	100,00
Perkebunan		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	76	68	43	187
	Kategori II	89	71	54	214
	Kategori III	9	51	36	96
	Jumlah	174	190	133	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	15,29	13,68	8,65	37,63
	Kategori II	17,91	14,29	10,87	43,06
	Kategori III	1,81	10,26	7,24	19,32
	Jumlah	35,01	38,23	26,76	100,00
Peternakan		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	89	48	16	153
	Kategori II	68	106	75	249
	Kategori III	16	37	42	95
	Jumlah	173	191	133	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	17,91	9,66	3,22	30,78
	Kategori II	13,68	21,33	15,09	50,10
	Kategori III	3,22	7,44	8,45	19,11
	Jumlah	34,81	38,43	26,76	100,00

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Keterangan: Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah

Tabel 6. Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi kategori subsektor hortikultura dan perkebunan dan peternakan berdasarkan nilai ICOR, 2008–2012

Subsektor	Subsektor Keterangan	Hortikultura			Jumlah
		Kategori I	Kategori II	Kategori III	
Perkebunan		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	87	90	11	188
	Kategori II	53	128	34	215
	Kategori III	15	30	49	94
	Jumlah	155	248	94	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	17,51	18,11	2,21	37,83
	Kategori II	10,66	25,75	6,84	43,26
	Kategori III	3,02	6,04	9,86	18,91
	Jumlah	31,19	49,90	18,91	100,00
Peternakan		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	75	64	15	154
	Kategori II	70	138	43	251
	Kategori III	10	45	37	92
	Jumlah	155	247	95	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	15,09	12,88	3,02	30,99
	Kategori II	14,08	27,77	8,65	50,50
	Kategori III	2,01	9,05	7,44	18,51
	Jumlah	31,19	49,70	19,11	100,00

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Keterangan: Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah

Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi nilai ICOR antarsubsektor

Pada kombinasi antara subsektor hortikultura dengan subsektor perkebunan (Tabel 6) diperoleh jumlah kabupaten/kota yang memiliki kombinasi kategori I+I, I+II, II+I, dan II+II adalah 358 kabupaten/kota atau 72,03% dan kombinasi antara subsektor hortikultura dengan subsektor peternakan adalah 347 kabupaten/kota atau 69,82% dari total 497 total 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pada kombinasi antara subsektor perkebunan dan peternakan (Tabel 7) diperoleh jumlah kabupaten/kota yang memiliki kombinasi kategori I+I, I+II, II+I, dan II+II adalah 351 kabupaten/kota atau 70,62% dari total 497 total 497 kabupaten/kota di Indonesia.

perlu diberikan alternatif.

Berdasarkan batasan bahwa anggaran terbatas maka fokus utama perlu diberikan pada kabupaten kota yang memiliki kombinasi kategori I+I, II+I dan I+II baik untuk kombinasi subsektor dengan sektor pertanian maupun antara subsektor pada pilihan satu atau dua subsektor fokus dan kombinasi tiga subsektor fokus, yang selanjutnya dipilih satu atau dua subsektor fokus sebagai utama. Alternatif pilihan satu atau dua subsektor yang diperoleh dari berbagai kombinasi di atas didasarkan atas fakta bahwa dalam kenyataannya pada setiap kabupaten/kota hanya memiliki satu atau dua subsektor saja yang memiliki kontribusi relatif besar dalam struktur perekonomian daerah kabupaten/kota, sekalipun seluruh subsektor

Tabel 7. Jumlah kabupaten/kota berdasarkan kombinasi kategori subsektor perkebunan dan peternakan berdasarkan nilai ICOR, 2008–2012

Subsektor	Subsektor	Perkebunan			Jumlah
	Keterangan	Kategori I	Kategori II	Kategori III	
Peternakan		----- Jumlah kabupaten -----			
	Kategori I	70	72	13	155
	Kategori II	88	121	42	251
	Kategori III	30	21	40	91
	Jumlah	188	214	95	497
		----- Persentase (%) -----			
	Kategori I	14,08	14,49	2,62	31,19
	Kategori II	17,71	24,35	8,45	50,50
	Kategori III	6,04	4,23	8,05	18,31
	Jumlah	37,83	43,06	19,11	100,00

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Keterangan: Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah

Arahan Fokus Utama Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Analisis Nilai ICOR

Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10 disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah selaku salah satu pelaku investasi perlu memiliki fokus untuk untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya terbatas dan dihadapkan pada target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan harus dicapai. Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara efisien untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dimaksud, oleh karena itu diperlukan pemilihan kabupaten/kota sebagai fokus utama. Mengingat setiap kabupaten/kota tidak hanya akan dikembangkan satu subsektor saja, maka

dalam cakupan sektor pertanian di bawah pembinaan Kementerian Pertanian dikembangkan.

Jumlah kabupaten/kota dengan fokus utama satu subsektor

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 230 kabupaten/kota atau 46,28% kabupaten/kota yang dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan sebagai fokus utama pengembangan investasi subsektor tanaman pangan, 202 kabupaten/kota atau 40,64% sebagai alternatif dengan fokus utama, 214 kabupaten/kota atau 43,06% sebagai alternatif pilihan dengan fokus utama subsektor perkebunan, dan 211 kabupaten/kota atau

Tabel 8. Jumlah kabupaten/kota arahan fokus utama satu subsektor berdasarkan hasil analisis kombinasi kategori nilai ICOR sektor pertanian dengan subsektor dan antarsubsektor, 2008–2012

No.	Keterangan kombinasi subsektor	Kabupaten/Kota		Fokus utama subsektor
		Jumlah	Persentase (%)	
1.	Pertanian - Tanaman pangan	230	46,28	Tanaman pangan
2.	Pertanian - Hortikultura	202	40,64	Hortikultura
3.	Pertanian - Perkebunan	214	43,06	Perkebunan
4.	Pertanian - Peternakan	211	42,45	Peternakan

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Tabel 9. Jumlah kabupaten/kota arahan fokus utama satu subsektor dengan alternatif subsektor lainnya berdasarkan hasil analisis kombinasi kategori nilai ICOR sektor pertanian dengan subsektor dan antarsubsektor, 2008–2012

No.	Keterangan kombinasi subsektor	Kabupaten/Kota		Fokus Utama Subsektor
		Jumlah	Persentase (%)	
1.	Tanaman pangan - Hortikultura	218	43,86	Tanaman Pangan/Hortikultura
2.	Tanaman pangan - Perkebunan	233	46,88	Tanaman Pangan/Perkebunan
3.	Tanaman pangan - Peternakan	205	41,25	Tanaman Pangan/Peternakan
4.	Hortikultura - Perkebunan	230	46,28	Hortikultura/Perkebunan
5.	Hortikultura - Peternakan	209	42,05	Hortikultura/Peternakan
6.	Perkebunan - Peternakan	230	46,28	Perkebunan/Peternakan

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

42,45%. Di antara berbagai kabupaten ini terdapat irisan di mana selain memiliki fokus utama sebagai lokasi peningkatan alokasi investasi pada satu subsektor juga memiliki kategori sebagai fokus utama pada subsektor lainnya.

Jika keputusan pemerintah didasarkan pada Tabel 8, maka jumlah kabupaten/kota yang bukan merupakan fokus utama pengembangan subsektor adalah berkisar antara 267–295 kabupaten/kota atau 53,72% hingga 59,32% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pada kabupaten/kota tersebut fokus utama harus diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Jumlah kabupaten dengan fokus utama satu subsektor dan alternatif subsektor pilihan

Tabel 9 memberikan gambaran di mana terdapat irisan di mana selain memiliki fokus utama sebagai lokasi peningkatan alokasi investasi pada satu subsektor juga memiliki kategori sebagai fokus utama pada subsektor

lainnya. Hasil ini memberikan kesempatan atau peluang untuk memiliki salah satu subsektor sebagai pilihan fokus utama.

Jika pada Tabel 8 hanya memberikan satu alternatif sebagai pilihan utama, maka pada Tabel 9 terdapat pilihan satu subsektor dengan satu subsektor sebagai alternatif pilihan fokus utama. Jumlah kabupaten/kota dengan fokus utama subsektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai alternatif adalah 218 kabupaten/kota atau 43,86%. Sementara itu, jumlah kabupaten/kota dengan subsektor tanaman pangan dan perkebunan sebagai alternatif fokus utama adalah 233 kabupaten/kota atau 46,88%, dan jika peternakan sebagai alternatif fokus utama 205 kabupaten/kota atau 41,25%.

Pada pilihan fokus utama subsektor hortikultura dengan alternatif fokus utama perkebunan terdapat 230 kabupaten/kota atau 46,28%, dan apabila peternakan sebagai alternatif fokus utama terdapat 209 kabupaten/kota atau 42,05%. Sementara, pada

fokus utama subsektor perkebunan dan peternakan sebagai alternatif fokus utama terdapat 230 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Adanya alternatif pilihan dari fokus utama ini memberikan peluang besar kemungkinan untuk penggabungan dua subsektor menjadi fokus utama.

48,09%. Sementara itu, untuk tanaman pangan dan perkebunan terdapat 250 kabupaten/kota atau 50,70% dan tanaman pangan dan peternakan terdapat 243 kabupaten/kota atau 48,89% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Jumlah kabupaten/kota dengan kombinasi fokus utama subsektor hortikultura dan

Tabel 10. Jumlah kabupaten/kota arahan fokus utama lebih dari satu subsektor berdasarkan hasil analisis kombinasi kategori nilai ICOR sektor pertanian dengan subsektor dan antarsubsektor, 2008–2012

No.	Kombinasi subsektor	Kabupaten/Kota		Fokus utama subsektor
		Jumlah	Persentase (%)	
1.	Tanaman pangan - Hortikultura - Perkebunan	239	48,09	Tanaman pangan - Hortikultura
2.	Tanaman pangan - Hortikultura - Peternakan	252	50,70	Tanaman pangan - Peternakan
3.	Tanaman pangan - Perkebunan - Peternakan	243	48,89	Tanaman pangan - Perkebunan
4.	Hortikultura - Perkebunan - Peternakan	256	51,51	Hortikultura - Peternakan
5.	Hortikultura - Perkebunan - Peternakan	270	50,50	Perkebunan - Peternakan
6.	Perkebunan - Hortikultura - Peternakan	235	48,89	Perkebunan - Hortikultura

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Lampiran 1

Jika keputusan pemerintah didasarkan pada Tabel 9, maka jumlah kabupaten/kota yang bukan merupakan fokus utama pengembangan dengan satu subsektor dengan satu subsektor sebagai alternatif pilihannya adalah berkisar antara 264–292 kabupaten/kota atau 53,12% hingga 58,75% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pada kabupaten/kota tersebut fokus utama harus diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Jumlah kabupaten/kota dengan fokus utama lebih dari satu subsektor

Tabel 10 menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR dengan tingkat efisiensi relatif tinggi pada kombinasi kategori I+I, II+I, dan I+II untuk tanaman pangan dan hortikultura adalah 239 kabupaten/kota atau

peternakan adalah 256 kabupaten/kota atau 51,51%, kombinasi fokus utama subsektor perkebunan dan peternakan adalah 270 kabupaten/kota atau 50,50%, dan kombinasi subsektor perkebunan dan hortikultura sebagai fokus utama adalah 235 kabupaten/kota atau 48,89% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Jika keputusan pemerintah didasarkan pada Tabel 10, maka jumlah kabupaten/kota yang bukan merupakan fokus utama pengembangan lebih dari satu subsektor adalah berkisar antara 241–262 kabupaten/kota atau 53,12% hingga 58,75% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pada kabupaten/kota tersebut fokus utama harus diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Kebijakan dan Perbaikan Arah Investasi Berdasarkan Hasil Analisis Nilai ICOR Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan nilai kategori ICOR yang dimiliki, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota baik pada pilihan fokus utama satu subsektor, fokus utama satu subsektor dengan alternatif pilihan satu subsektor lainnya sebagai fokus utama, maupun fokus utama lebih dari satu subsektor memiliki prospek investasi baik untuk masing-masing dengan tingkat efisiensi sedang hingga tinggi. Pada kabupaten/kota tersebut investasi pada masing-masing subsektor maupun sektor pertanian, serta kombinasi dua subsektor atau lebih dari dua subsektor dapat diandalkan memberikan pertumbuhan nilai output yang relatif tinggi pada nilai investasi yang relatif lebih rendah atau sama dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kondisi efisien dan fokus utama subsektor baik satu subsektor, satu subsektor dengan alternatif, serta kombinasi lebih dari subsektor hanya berkisar antara 202 hingga 270 kabupaten/kota dengan rata-rata 230 kabupaten/kota atau antara 40,64% hingga 51,51% dengan rata-rata 45,77%. Dengan demikian, maka kabupaten yang tidak berada pada fokus utama pengembangan subsektor atau pengembangan harus difokuskan pada subsektor pertanian secara menyeluruh adalah berkisar antara 227 hingga 295 kabupaten/kota dengan rata-rata 267 kabupaten atau berkisar antara 48,49% hingga 59,36% dengan rata-rata 54,23% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Tinggi rendahnya nilai ICOR mencerminkan efisien tidaknya kondisi perekonomian. Semakin tinggi nilai ICOR semakin tidak efisien perekonomian tersebut, artinya penggunaan anggaran modal perusahaan dan belanja pemerintah yang merupakan investasi tidak menghasilkan output yang optimal dan produktivitasnya rendah. Berdasarkan hal ini maka pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR yang tinggi memiliki kondisi produktivitas dan nilai produksi yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Di samping itu, dapat juga kabupaten/kota tersebut memiliki kondisi di mana biaya investasi yang

digunakan relatif tinggi. Dengan demikian, nilai ICOR yang relatif rendah menunjukkan nilai tambah bruto tinggi karena hasil produksi yang tinggi dan harga produsen yang tinggi pula, dengan nilai investasi yang relatif rendah. Sementara, pada nilai ICOR yang relatif tinggi atau relatif tidak kurang efisien dihasilkan oleh nilai tambah bruto yang relatif rendah dengan nilai investasi yang relatif tinggi.

Nilai ICOR bersifat dinamis dan bukan berarti kabupaten/kota yang saat ini memiliki tingkat efisiensi relatif tinggi akan selamanya bertahan. Demikian pula kabupaten/kota yang memiliki tingkat efisiensi relatif kurang tinggi juga selamanya akan demikian. Nilai ICOR dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDRB, di mana PDRB merupakan nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto dari suatu unit produksi dihitung dari output bruto atas harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Nilai tambah adalah suatu tambahan nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Penambahan nilai input antara ini terjadi karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Proses ini terkait erat dengan belanja investasi atau barang modal yang digunakan untuk mendukung proses penggunaan input antara tersebut. Input antara sendiri mencakup nilai seluruh komoditas yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara, bukan barang modal. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai ICOR akan tergantung tinggi rendahnya nilai tambah dan nilai investasi dari belanja modal yang digunakan dalam proses produksi.

Arsyad (1988) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ICOR adalah apabila: (1) ketersediaan sumber daya alam terbatas dan pertumbuhan penduduk rendah; (2) inovasi dengan teknologi tinggi (*hitech*) dan sifat teknologi padat modal (*capital intensive*); (3) laju investasi tinggi dan komposisi investasi terbesar berupa proyek

barang publik; (4) tingkat efisiensi faktor produksi modal rendah; (5) kualitas keterampilan manajerial dan organisasional rendah; (6) tingginya suku bunga pinjaman dan tingkat upah; (7) kebijakan ketenagakerjaan pada penyerapan tenaga kerja berupa investasi proyek barang publik; (8) cepatnya laju kemajuan industrialisasi; (9) laju inflasi yang tidak terkendali atau tinggi; dan (10) pembangunan prasarana sosial dan ekonomi pada awal pembangunan.

Joyohadikusumo dalam Gofar (1994) menunjukkan bahwa tingginya nilai ICOR atau rendahnya tingkat efisiensi investasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh terjadinya pemborosan. Pemborosan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) investasi dalam infrastruktur yang untuk sebagian bersifat *slow yielding* dan *low yielding* (memakan waktu agak lama sebelum investasi yang bersangkutan membuah hasil dan memberikan hasil rendah). Jika dikaitkan dengan investasi dana pembangunan pemerintah, kedua sifat tersebut banyak dijumpai pada proyek pembangunan prasarana umum seperti jalan, jembatan, serta jaringan irigasi di daerah terpencil yang potensinya minim dan perlu waktu lama untuk membuah hasil; (2) adanya kelemahan teknis dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan perawatan proyek-proyek investasi; (3) berbagai segi negatif pada iklim institusional, yaitu penyimpangan dan penyelewengan karena kurang dipatuhinya kaidah-kaidah moral secara normatif. Pemborosan dana anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu akan membuat pembangunan menjadi terganggu, infrastruktur terganggu, negara selalu dirugikan, rakyat dirugikan, terjadi ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan nilai ICOR Indonesia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki pertumbuhan PDB yang paling rendah dan laju inflasi paling tinggi.

Hasil penelitian Setiyanto *et al.* (2014) menunjukkan bahwa semakin menurunnya kinerja dan rendahnya efisiensi pembangunan pertanian disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pembangunan pertanian memiliki

fokus komoditas, tetapi tidak memiliki fokus lokasi, sehingga pembangunan pertanian tidak memiliki fokus lokasi dan daya ungkit yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; (2) pembangunan pertanian tidak memiliki unsur utama yang merupakan upaya yang mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru untuk produksi pertanian dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan perluasan areal; (3) anggaran pemerintah yang merupakan komponen investasi penting dalam pembangunan pertanian, tidak digunakan sebagai pendanaan investasi pada aspek-aspek yang tidak mampu didanai oleh swasta dan masyarakat untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi, namun justru dialokasikan sebagian besar menjadi dana bantuan sosial; (4) pembangunan pertanian yang dilaksanakan tidak memiliki pendekatan yang mampu mengatasi mengatasi masalah-masalah yang terjadi, serta mengatasi berbagai kelemahan dari sisi perencanaan dan implementasinya; (5) perencanaan pembangunan tidak didukung oleh data dan informasi statistik dan analisis yang *reliable* dan relevan; (6) sasaran pembangunan yang ditetapkan tidak realistis pada satu sisi terdapat target tinggi dengan biaya investasi rendah dan pada pihak lain ditemukan target demikian rendahnya didanai dengan biaya yang tinggi; (7) sumber daya manusia lemah, khususnya dari sisi kapasitas perencana, organisasi perencana, dan organisasi operasional; (8) dasar pendidikan dan perencanaan pembangunan sangat lemah dan terdapat ketimpangan antara pusat dan daerah, di samping kekurangan sumber daya manusia; (9) sasaran yang ditetapkan kurang realistis dan kurang sesuai dengan kondisi spesifik wilayah; (10) sinkronisasi baik di dalam unit-unit eselon I Kementerian Pertanian, antara Kementerian Pertanian dengan instansi lain di pusat maupun antara Kementerian Pertanian di tingkat pusat maupun instansi terkait pertanian di daerah sangat lemah dengan indikasi perencanaan bersifat membagi-bagi anggaran antarunit eselon I dan dengan daerah; (11) perencanaan dan implementasi pembangunan tidak didasarkan atas teori kebutuhan pembangunan yang tepat; (12) lemahnya monitoring dan evaluasi karena monitoring dan evaluasi hanya

memenuhi persyaratan administrasi dan tidak menciptakan kondisi umpan balik atas temuan dan menghasilkan perbaikan atas permasalahan dan kelemahan yang terjadi; (13) penetapan sasaran, prioritas pencapaian tujuan, dan waktu karena perencanaan pusat dan daerah tidak seiring dan sejalan; (14) keseimbangan dalam perencanaan dan implementasi lemah karena perbedaan kapasitas dan kesulitan dalam penerjemahan dari perencanaan dan implementasi; (15) administrasi yang dibangun tidak ekonomis dan sistem administrasi yang dikembangkan belum efisien sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan pemborosan penggunaan dana pembangunan; dan (16) program, rencana, dan implementasi pembangunan dilaksanakan dalam kondisi bias orientasi karena adanya unsur aspirasi pada lembaga legislatif, memenuhi keinginan kepala daerah, maupun hal-hal lain yang bersifat politis atau berada di luar pertimbangan rencana dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Peningkatan efisiensi akan dapat dilakukan melalui perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi pembangunan, dan perbaikan kondisi iklim investasi atau kebijakan yang kondusif dan implementasinya. Pemerintah pusat dan daerah melakukan fokus utama investasi pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR relatif rendah dan melakukan perbaikan kinerja dan efisiensi pembangunan fokus pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR relatif tinggi. Penyebab tingginya nilai ICOR cukup banyak dan perbaikannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun harus secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta kalangan swasta dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai ICOR menurut provinsi maupun kabupaten/kota sebagian besar berada pada nilai kurang dari empat sehingga menunjukkan bahwa investasi pertanian periode 2008–2012 relatif efisien. Hasil klasifikasi menunjukkan

bahwa jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori efisiensi relatif tinggi dan sedang mencapai 73,24% pada subsektor tanaman pangan; 81,09% pada subsektor hortikultura; 80,89% pada perkebunan, 81,49% pada subsektor peternakan; dan 70,63% untuk sektor pertanian. Investasi pada masing-masing subsektor khususnya maupun sektor pertanian umumnya memiliki prospek baik untuk menghasilkan output dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis kombinasi sektor pertanian dengan subsektor yang ada di dalamnya yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan sedang menunjukkan bahwa pada subsektor tanaman pangan terdapat jumlah kabupaten/kota sebanyak 316 kabupaten/kota atau 63,58%, subsektor hortikultura adalah 342 kabupaten/kota atau 68,81%, subsektor perkebunan 313 kabupaten/kota atau 62,98% dan subsektor peternakan adalah 315 kabupaten/kota atau 63,38% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Investasi pertanian pada masing-masing subsektor dan masing-masing kabupaten/kota memberikan peluang tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga sektor pertanian dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup efisien.

Jumlah kabupaten/kota dapat dijadikan fokus utama investasi anggaran pemerintah dalam rangka mengejar pencapaian sasaran pembangunan pertanian jangka pendek dan menengah dan bertumpu pada subsektor tertentu atau kombinasi antara subsektor adalah antara 202 hingga 270 kabupaten/kota dengan rata-rata 230 kabupaten/kota atau antara 40,64% hingga 51,51% dengan rata-rata 45,77%. Sementara, sisanya antara 227 hingga 295 kabupaten/kota dengan rata-rata 267 kabupaten/kota atau berkisar antara 48,49% hingga 59,36% dengan rata-rata 54,23% dari 497 kabupaten/kota di Indonesia perlu ditempatkan untuk pencapaian target jangka menengah dan panjang dan bertumpu pada sektor pertanian bukan fokus pada subsektor.

Pendekatan investasi dengan fokus komoditas dan subsektor secara terkotak-kotak seperti yang selama ini dilakukan menghasilkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki efisiensi

investasi relatif tinggi lebih sedikit jika dibandingkan efisiensi relatif kurang tinggi dan dalam konteks pembangunan berbasis kabupaten/kota pendekatan subsektor dan komoditas nampaknya menghasilkan kondisi tingkat efisiensi yang relatif kurang tinggi jika dibandingkan ke arah pendekatan sektor pertanian dan berdimensi kewilayahan. Tinggi rendahnya ICOR disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor penyebab secara nasional maupun menurut situasi dan kondisi masing-masing kabupaten/kota.

Nilai ICOR bersifat dinamis dan bukan berarti kabupaten/kota yang saat ini memiliki tingkat efisiensi relatif tinggi akan selamanya bertahan. Demikian pula kabupaten/kota yang memiliki tingkat efisiensi relatif kurang tinggi juga bukan berarti selamanya akan demikian. Peningkatan efisiensi akan dapat dilakukan melalui perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi pembangunan, dan perbaikan kondisi iklim investasi atau kebijakan yang kondusif dan implementasinya.

Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan fokus utama investasi pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR relatif rendah dan melakukan perbaikan kinerja dan efisiensi pembangunan fokus pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR relatif tinggi. Fokus utama investasi pada kabupaten/kota ICOR relatif rendah perlu dilakukan dalam rangka penghematan anggaran dan pencapaian target pembangunan pertanian dalam jangka pendek dan menengah, sedangkan perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi pembangunan pada kabupaten/kota yang memiliki nilai ICOR relatif tinggi perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target pembangunan pertanian jangka menengah dan panjang.

Nilai ICOR tidak dapat digunakan secara rinci untuk menjelaskan faktor-faktor pemborosan maupun penghematan penggunaan dana investasi, namun memberikan sinyal bahwa semakin tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien penggunaan dana tersebut. ICOR berguna sebagai salah satu analisis dalam pendekatan awal untuk mendapat

gambaran kuantitatif dan untuk membuka jalan bagi penelitian empirik yang harus dilakukan lebih konkret dan terinci terhadap permasalahan yang bersangkutan. Penelitian untuk mengkaji penyebab utama tinggi atau rendahnya ICOR sektor pertanian penting untuk dilakukan.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi kebijakan untuk memberikan fokus investasi pada subsektor atau sektor pertanian dalam rangka meningkatkan investasi di daerah baik yang bersumber dari investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berdasarkan nilai ICOR masing-masing subsektor dan kabupaten/kota selanjutnya dapat dilakukan perhitungan kebutuhan investasi masing-masing setelah sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Sekretariat Jenderal dapat melakukan koordinasi penentuan fokus utama subsektor dan kabupaten/kota untuk menyandingkan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan investasi dapat dilakukan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2010. Teori Pertumbuhan Wilayah. Jurusan Teknik Perkapalan. Makassar: Universitas Sultan Hassanuddin.
- Ambarita, F. 2012. Analisis Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektor Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2008. Tesis. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Anwar K., R. Adisasmita, dan Nursini, 2010. Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Kabupaten Maros. Makassar: Sultan Hasanuddin.
- Arsyad, L. 1988. Ekonomi Pembangunan. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Astrini, U.R. 2013. Analisis Revitalisasi Sektor Pertanian dalam Pembangunan terhadap Perekonomian di Jawa Timur melalui

- Pendekatan Input-Output. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Baba, S.H., A.S. Saini, K.D. Sharma, and D.R. Thakur. 2010. Impact of investment on agricultural growth and rural development in Himachal Pradesh: Dynamics of public and private investment. *Indian Journal of Agriculture Economic* 65(1):135-158.
- BKPM. 2012. *Persetujuan dan Realisasi Investasi 1967–2012*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bappeda Kabupaten Banyuwangi. 2014. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Banyuwangi 2014*. Banyuwangi: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Bappeda Kota Semarang. 2011. *Analisis ICOR Kota Semarang 2010*. Semarang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Biro Perencanaan. 2013a. *Analisis Penentuan Peringkat Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan*. Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Biro Perencanaan. 2013b. *Analisis Penilaian Kelas Kawasan Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan*. Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Incremental Capital Output Rasio Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- BPS Kabupaten Situbondo. 2012. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labor Output Ratio (ILOR) Kabupaten Situbondo Tahun 2011*. Situbondo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.
- BPS. 2009–2013. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia atas Dasar Penggunaan*. Lima Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2009–2013. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia atas Dasar Lapangan Usaha*. Lima Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2006–2013. *Tinjauan Perekonomian Daerah Kabupaten Kota Menurut Lapangan Usaha 2007–2009, 2008–2010, 2009–2011, 2010–2011*. Empat Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2008–2013. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota Menurut Penggunaannya 2008–2013*. Berbagai Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2000–2010. *Tabel Input-output Indonesia 2000, 2005, dan 2008*. Tiga Edisi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Bandung. 2008. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Bandung: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung
- BPS Provinsi Sumatera Barat. 2008. *Investasi Dan ICOR Sumatera Barat 2000–2007*. Padang: Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and World Bank. 2009. *System of National Accounts 2008*. New York: European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and World Bank.
- Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, and World Bank. 1994. *System of National Accounts 1993*. Sales No. E.94.XVII.4. New York: United Nations Publications.
- Dernburg, T.F. 1985. *Macroeconomics: Concepts, Theories and Policies*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Departemen Keuangan. 1983. *Himpunan Paket Kebijakan Juni 1983*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Departemen Keuangan. 1984. *Himpunan Paket Kebijakan Oktober 1984*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Domar, E. 1946. Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica* 14(2):137-147.

- Dwiastuti, R., Sujarwo, dan R. Asmara, 2008. Pemetaan ICOR komoditas wilayah untuk mendukung kebijakan revitalisasi pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20(1): 50-56.
- Edward, J.R.. 1991. *Macroeconomics: Equilibrium and Disequilibrium Analysis*. Singapore: Macmillan Publishing Company.
- Estache, A. and R. Muñoz. 2007. Building Sector Concerns into Macroeconomic Financial Programming: Lessons From Senegal and Uganda Africa Region Working Paper Series No. 108 December 2007. <http://www.worldbank.org/afr/wps/index.ht>. (12 Agustus 2013).
- European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, and World Bank, 2009. *System of National Accounts 2008*. New York: United Nations Publications.
- Gofar, A. 1994. ICOR. *Majalah Anggaran*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Hanani, N. dan I. Nugroho. 2004. Kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor pertanian: suatu pendekatan input-output. *AGRIVITA* 26(2):161-171.
- Hanani, N. dan I. Nugroho. 2006. Kebutuhan investasi sektor pertanian berbasis pengembangan komoditi: pendekatan input-output. *AGRIVITA* 28(2):114-126.
- Harrod, R.F. 1939. An essay in dynamic theory. *The Economic Journal* 49(193):14-33.
- Ilham, M., 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota, ICOR, Investasi Terhadap Perekonomian Daerah Kota Tebing Tinggi. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Jhingan, M.L, 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jun, Z. 2003. Investment, investment efficiency, and economic growth in China. *Journal of Asian Economics* 14:713-734.
- Kementerian Keuangan. 2008-2013. *Nota Keuangan dan RAPBN 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*. Series Lima Edisi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. 2014. *Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2014–2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Ma'ruf, A. 2009. Anatomi makro ekonomi regional: studi kasus Provinsi DIY. *JEJAK* 2(2):114-125.
- Mahmud, M.F., 2008. Incremental capital output ratio: Barometer efisiensi perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1).
- Mangun, N. 2007. Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis. (Online). http://eprints.undip.ac.id/15755/1/Nudiatulhuda_Mangun.pdf (5 Januari 2010).
- OECD, 2014. *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014: Beyond the Middle-Income Trap*. Paris: OECD Publishing. 9789264204003 (PDF); 9789264203990 (print). DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/sao-2014-en>.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2009-2013. *Statistik Pertanian Tahun 2008-2012*. Lima Edisi. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2011-2013. *Statistik Pertanian Hulu*. Buku I, II, III, dan IV. Empat Edisi. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian.
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. 1999. *Kajian Kebutuhan Investasi Pembangunan Perikanan dalam Pembangunan Lima Tahun Mendatang (1999-2003)*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. 1997. *Kajian Perkiraan Kebutuhan Investasi Pertanian dan Pemenuhannya dalam Repelita VII*. Jakarta: PPUP Biro Perencanaan Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Rahmawati, L., H. Cahyono, dan R.Y. Kurniawan. 2011. Analisis Kebutuhan Investasi Sektoral Jawa Timur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal ISEI* 1(1):54-63.
- Sadeghi, Z., M. Nikzad, and M.B. Todsheki. 2014. Investigating effect of development of agricultural, industrial, service and oil revenue to ICOR of agricultural sector. *International Journal of Agricultural Management and Development* 4(3):227-235.

- Saleh, I, H. Varmazyari, and H. Moslemzadeh. 2008. Investigation the potential of investment in agricultural sector of Iran (Emphasizing on national development programs). *American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.* 2(Supple 1):108-112.
- Samuelson, P.A., and W.D. Nordhaus, W.D. 1998. *Economics*, Singapore: The McGraw-Hill Companies.
- Setiyanto, A. Supriyati, S.H. Susilowati, A. Purwoto, M. Suryadi, Y. Supriyatna, dan F.B.M. Dabukke. 2014. *Outlook Pertanian 2015–2019*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sjahputra, S. 2008. *Kebutuhan Investasi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008–2011*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sukirno, S. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Pertama*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi 9. Jilid 1. Alih Bahasa Haris Munandar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Trinh, B., K. Kobayashi, P.L. Hoa, and N.V. Phong. 2012. Vietnamese economic structural change and policy implications. *Global Journal of Human Social Science. Sociology, Economics & Political Science* 12(9).
- United Nations. 1968. *A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No. 2, Rev. 3*. New York: United Nations Publications.
- Ward, M. 1976. *The Measurement of Capital. The Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*. Paris: OECD.

Lampiran 1. Hasil analisis perkiraan nilai ICOR subsektor dan sektor pertanian menurut kabupaten/kota, 2008–2011

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
1.	Simeulue	3,14	II	3,18	I	2,99	I	3,00	I	3,20	I
2.	Aceh Singkil	3,24	II	3,22	I	2,94	I	3,00	I	3,28	II
3.	Aceh Selatan	2,94	I	3,08	I	2,89	I	2,82	I	3,14	I
4.	Aceh Tenggara	2,95	I	3,28	II	2,76	I	3,03	I	3,04	I
5.	Aceh Timur	3,07	II	3,21	I	2,81	I	2,87	I	3,20	I
6.	Aceh Tengah	3,38	III	3,26	II	2,77	I	2,88	I	3,26	II
7.	Aceh Barat	3,34	III	3,26	II	3,18	II	2,79	I	3,34	II
8.	Aceh Besar	3,14	II	3,48	II	3,37	II	2,90	I	3,44	II
9.	Pidie	2,97	I	3,10	I	3,00	I	3,09	II	3,17	I
10.	Bireuen	3,09	II	3,41	II	3,15	II	2,80	I	3,34	II
11.	Aceh Utara	3,04	I	3,05	I	2,83	I	2,82	I	3,10	I
12.	Aceh Barat Daya	3,41	III	3,21	I	2,98	I	2,89	I	3,29	II
13.	Gayo Lues	3,01	I	3,29	II	2,94	I	2,98	I	3,12	I
14.	Aceh Tamiang	3,16	II	3,05	I	2,74	I	2,91	I	3,15	I
15.	Nagan Raya	2,84	I	3,18	I	2,84	I	2,77	I	3,11	I
16.	Aceh Jaya	3,04	I	3,00	I	2,75	I	2,79	I	3,06	I
17.	Bener Meriah	3,37	III	3,16	I	2,75	I	2,78	I	3,20	I
18.	Pidie Jaya	2,92	I	2,95	I	2,82	I	2,93	I	3,03	I
19.	Kota Banda Aceh	3,20	II	3,15	I	3,29	II	3,26	II	3,24	I
20.	Kota Sabang	3,30	II	3,28	II	3,27	II	3,27	II	3,04	I
21.	Kota Langsa	3,09	II	3,27	II	3,27	II	2,89	I	3,03	I
22.	Kota Lhokseumawe	3,20	II	3,39	II	3,28	II	3,15	II	3,22	I
23.	Kota Subulussalam	3,34	III	3,28	II	3,28	II	2,86	I	3,05	I
24.	Nias	3,11	II	3,30	II	2,78	I	2,94	I	3,11	I
25.	Mandailing Natal	3,03	I	3,23	II	2,67	I	2,70	I	3,14	I
26.	Tapanuli Selatan	2,89	I	2,95	I	2,77	I	2,88	I	3,01	I
27.	Tapanuli Tengah	3,10	II	3,11	I	2,76	I	3,05	I	3,14	I
28.	Tapanuli Utara	3,11	II	3,30	II	2,85	I	2,79	I	3,24	I
29.	Toba Samosir	2,94	I	3,18	I	2,97	I	3,12	II	3,16	I
30.	Labuhan Batu	3,28	II	3,34	II	2,84	I	3,26	II	3,33	II
31.	Asahan	3,11	II	3,29	II	3,55	III	2,80	I	3,03	I
32.	Simalungun	2,89	I	2,90	I	3,26	II	2,79	I	3,00	I
33.	Dairi	2,97	I	3,15	I	2,93	I	3,17	II	3,15	I
34.	Karo	2,96	I	2,77	I	3,32	II	2,87	I	3,28	II
35.	Deli Serdang	3,00	I	3,19	I	2,83	I	3,23	II	3,16	I
36.	Langkat	3,00	I	3,43	II	2,77	I	2,74	I	3,28	II
37.	Nias Selatan	3,17	II	2,97	I	2,89	I	2,89	I	3,12	I
38.	Humbang Hasundutan	3,00	I	3,24	II	2,95	I	2,79	I	3,19	I
39.	Pakpak Bharat	2,96	I	3,30	II	3,19	II	3,28	II	3,12	I
40.	Samosir	2,95	I	3,04	I	2,76	I	3,03	I	3,08	I
41.	Serdang Bedagai	2,98	I	3,29	II	2,73	I	3,16	II	3,19	I
42.	Batu Bara	3,46	III	3,81	III	3,28	II	2,87	I	3,68	III
43.	Padang Lawas Utara	3,05	I	3,29	II	2,89	I	3,27	II	3,21	I
44.	Padang Lawas	2,95	I	3,03	I	3,27	II	3,15	II	3,02	I
45.	Labuhan Batu Selatan	3,62	III	3,36	II	2,70	I	3,25	II	3,41	II
46.	Labuhan Batu Utara	3,77	III	3,67	III	2,75	I	2,86	I	3,60	III
47.	Nias Utara	2,98	I	2,99	I	3,27	II	2,85	I	3,08	I
48.	Nias Barat	3,19	II	3,07	I	3,28	II	3,27	II	3,19	I
49.	Kota Sibolga	3,28	II	3,28	II	3,64	III	3,28	II	3,46	II
50.	Kota Tanjung Balai	3,29	II	3,28	II	3,28	II	2,95	I	3,06	I
51.	Kota Pematang Siantar	3,29	II	3,28	II	3,28	II	3,27	II	3,06	I
52.	Kota Tebing Tinggi	3,29	II	3,28	II	3,28	II	3,92	III	3,07	I
53.	Kota Medan	3,79	III	4,73	III	4,59	III	3,58	III	3,84	III
54.	Kota Binjai	3,06	II	3,28	II	3,13	II	3,75	III	3,11	I
55.	Kota Padangsidimpuan	3,29	II	3,26	II	3,85	III	3,30	II	3,05	I
56.	Kota Gunungsitoli	3,29	II	3,27	II	3,59	III	3,30	II	3,04	I
57.	Kepulauan Mentawai	2,97	I	3,16	I	3,28	II	3,04	I	3,17	I
58.	Pesisir Selatan	2,98	I	3,31	II	2,86	I	3,09	II	3,22	I
59.	Solok	2,87	I	3,21	I	3,01	II	3,00	I	3,32	II
60.	Sijunjung	3,35	III	3,20	I	2,75	I	2,88	I	3,25	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kate- gori	ICOR	Kate- gori	ICOR	Kate- gori	ICOR	Kate- gori	ICOR	Kate- gori
61.	Tanah Datar	2,93	I	3,08	I	2,93	I	2,95	I	3,12	I
62.	Padang Pariaman	3,01	I	3,32	II	3,29	II	3,08	II	3,32	II
63.	Agam	2,83	I	3,13	I	3,05	II	2,95	I	3,22	I
64.	Lima Puluh Kota	2,89	I	3,24	II	2,81	I	3,05	I	3,15	I
65.	Pasaman	2,99	I	3,38	II	2,94	I	2,87	I	3,26	II
66.	Solok Selatan	3,07	II	3,17	I	2,97	I	3,10	II	3,20	I
67.	Dharmas Raya	3,36	III	3,24	II	2,82	I	3,25	II	3,31	II
68.	Pasaman Barat	3,23	II	3,66	III	3,17	II	4,16	III	3,58	III
69.	Kota Padang	3,27	II	4,35	III	3,86	III	3,26	II	3,45	II
70.	Kota Solok	3,28	II	3,28	II	3,92	III	3,27	II	3,07	I
71.	Kota Sawah Lunto	3,30	II	3,28	II	3,82	III	3,45	III	3,10	I
72.	Kota Padang Panjang	3,30	II	4,28	III	3,75	III	3,27	II	3,11	I
73.	Kota Bukittinggi	3,29	II	3,99	III	3,28	II	3,27	II	3,13	I
74.	Kota Payakumbuh	3,29	II	3,29	II	3,86	III	2,99	I	3,08	I
75.	Kota Pariaman	3,30	II	3,65	III	3,90	III	3,20	II	3,23	I
76.	Kuantan Singingi	3,10	II	3,30	II	2,72	I	3,28	II	3,26	II
77.	Indragiri Hulu	3,57	III	3,44	II	2,83	I	3,49	III	3,47	II
78.	Indragiri Hilir	3,30	II	3,53	II	2,83	I	3,45	III	3,47	II
79.	Pelalawan	3,37	III	3,49	II	2,75	I	2,87	I	3,43	II
80.	Siak	2,83	I	3,29	II	2,87	I	2,80	I	3,00	I
81.	Kampar	2,89	I	2,93	I	2,88	I	3,79	III	3,08	I
82.	Rokan Hulu	3,52	III	3,69	III	2,78	I	3,26	II	3,63	III
83.	Bengkalis	2,88	I	3,29	II	3,28	II	2,87	I	3,41	II
84.	Rokan Hilir	3,00	I	3,06	I	2,72	I	3,65	III	3,43	II
85.	Kepulauan Meranti	3,28	II	3,28	II	3,27	II	3,61	III	3,45	II
86.	Kota Pekanbaru	3,98	III	4,38	III	4,54	III	3,43	III	3,97	III
87.	Kota Dumai	3,52	III	4,50	III	3,90	III	3,26	II	3,56	III
88.	Karimun	2,95	I	3,28	II	3,28	II	3,27	II	3,03	I
89.	Bintan	3,34	III	3,04	I	2,95	I	3,28	II	3,21	I
90.	Natuna	3,12	II	3,28	II	3,28	II	3,26	II	3,11	I
91.	Lingga	3,07	II	3,28	II	3,58	III	3,36	II	3,03	I
92.	Kepulauan Anambas	2,96	I	3,26	II	3,27	II	4,39	III	3,11	I
93.	Kota Batam	3,59	III	3,30	II	3,96	III	3,28	II	3,35	II
94.	Kota Tanjung Pinang	3,26	II	3,28	II	3,20	II	3,24	II	3,20	I
95.	Kerinci	3,49	III	3,13	I	2,78	I	3,21	II	3,35	II
96.	Merangin	3,38	III	3,35	II	2,74	I	3,43	III	3,36	II
97.	Sarolangun	3,18	II	3,31	II	2,81	I	3,02	I	3,35	II
98.	Batang Hari	2,87	I	3,17	I	3,13	II	3,14	II	3,22	I
99.	Muaro Jambi	3,53	III	3,50	II	2,78	I	3,14	II	3,49	III
100.	Tanjung Jabung Timur	3,19	II	3,42	II	2,88	I	3,16	II	3,40	II
101.	Tanjung Jabung Barat	3,19	II	3,39	II	2,73	I	3,00	I	3,39	II
102.	Tebo	3,11	II	3,18	I	2,68	I	3,23	II	3,18	I
103.	Bungo	3,49	III	3,26	II	2,90	I	3,75	III	3,42	II
104.	Kota Jambi	3,18	II	3,88	III	3,98	III	3,64	III	3,23	I
105.	Kota Sungai Penuh	3,08	II	3,29	II	3,28	II	3,17	II	3,08	I
106.	Ogan Komering Ulu	3,55	III	3,40	II	2,81	I	3,26	II	3,42	II
107.	Ogan Komering Ilir	3,23	II	3,53	II	3,07	II	3,29	II	3,52	III
108.	Muara Enim	3,19	II	3,61	III	3,00	I	3,06	II	3,57	III
109.	Lahat	3,33	III	3,12	I	2,75	I	3,22	II	3,25	II
110.	Musi Rawas	3,06	II	3,25	II	2,84	I	3,27	II	3,27	II
111.	Musi Banyuasin	3,51	III	3,56	II	3,28	II	3,25	II	3,59	III
112.	Banyu Asin	3,40	III	3,36	II	2,90	I	3,26	II	3,40	II
113.	Ogan Komering Ulu Selatan	3,43	III	3,41	II	2,82	I	3,29	II	3,49	III
114.	Ogan Komering Ulu Timur	3,39	III	3,68	III	3,13	II	3,26	II	3,68	III
115.	Ogan Ilir	3,37	III	3,31	II	2,99	I	3,21	II	3,40	II
116.	Empat Lawang	3,18	II	3,17	I	2,88	I	3,75	III	3,30	II
117.	Kota Palembang	3,64	III	4,30	III	4,51	III	3,30	II	3,54	III
118.	Kota Prabumulih	3,16	II	3,61	III	3,28	II	3,28	II	3,19	I
119.	Kota Pagar Alam	3,06	II	3,29	II	3,77	III	3,29	II	3,12	I
120.	Kota Lubuklinggau	3,63	III	3,10	I	3,29	II	2,77	I	3,42	II
121.	Bangka	3,35	III	3,19	I	3,27	II	3,35	II	3,24	I
122.	Belitung	3,44	III	3,23	II	3,29	II	3,38	II	3,42	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
123.	Bangka Barat	3,47	III	3,52	II	3,29	II	3,15	II	3,59	III
124.	Bangka Tengah	3,58	III	3,51	II	3,11	II	3,05	I	3,51	III
125.	Bangka Selatan	3,07	II	3,03	I	2,84	I	3,29	II	3,18	I
126.	Belitung Timur	3,01	I	3,31	II	3,16	II	3,35	II	3,37	II
127.	Kota Pangkal Pinang	3,32	II	3,26	II	3,77	III	3,12	II	3,44	II
128.	Bengkulu Selatan	3,20	II	3,10	I	3,14	II	2,86	I	3,30	II
129.	Rejang Lebong	2,91	I	2,96	I	2,84	I	2,88	I	3,06	I
130.	Bengkulu Utara	3,01	I	3,03	I	2,80	I	3,03	I	3,11	I
131.	Kaur	2,99	I	2,87	I	2,76	I	2,88	I	3,29	II
132.	Seluma	2,97	I	2,96	I	2,78	I	2,90	I	3,07	I
133.	Mukomuko	2,96	I	2,97	I	2,96	I	2,89	I	3,11	I
134.	Lebong	3,03	I	3,00	I	2,87	I	3,14	II	3,13	I
135.	Kepahiang	3,56	III	3,58	II	3,08	II	3,20	II	3,57	III
136.	Bengkulu Tengah	3,30	II	3,51	II	2,92	I	3,18	II	3,48	III
137.	Kota Bengkulu	3,30	II	3,16	I	3,21	II	2,86	I	3,33	II
138.	Lampung Barat	3,22	II	3,06	I	2,80	I	3,20	II	3,17	I
139.	Tanggamus	3,48	III	3,71	III	3,21	II	3,08	II	3,77	III
140.	Lampung Selatan	3,19	II	3,32	II	2,71	I	3,14	II	3,36	II
141.	Lampung Timur	3,36	III	3,63	III	3,04	II	2,82	I	3,50	III
142.	Lampung Tengah	2,91	I	3,19	I	3,06	II	3,06	II	3,26	II
143.	Lampung Utara	3,57	III	3,63	III	2,80	I	3,23	II	3,51	III
144.	Way Kanan	3,17	II	3,29	II	2,90	I	3,13	II	3,31	II
145.	Tulangbawang	3,06	II	3,19	I	2,84	I	3,22	II	3,27	II
146.	Pesawaran	2,96	I	3,21	I	2,86	I	2,78	I	3,27	II
147.	Pringsewu	3,01	I	3,17	I	2,80	I	3,19	II	3,29	II
148.	Mesuji	3,43	III	3,44	II	2,91	I	3,10	II	3,42	II
149.	Tulangbawang Barat	3,41	III	3,43	II	2,92	I	3,92	III	3,47	II
150.	Kota Bandar Lampung	3,35	III	4,02	III	3,95	III	2,97	I	3,40	II
151.	Kota Metro	3,29	II	3,29	II	3,79	III	3,22	II	3,14	I
152.	Kepulauan Seribu	3,70	III	3,75	III	3,85	III	4,20	III	3,85	III
153.	Kodya Jakarta Selatan	3,94	III	4,06	III	4,79	III	4,73	III	4,80	III
154.	Kodya Jakarta Timur	3,89	III	4,88	III	4,87	III	4,97	III	4,84	III
155.	Kodya Jakarta Pusat	3,81	III	4,85	III	4,76	III	4,93	III	4,68	III
156.	Kodya Jakarta Barat	4,23	III	4,09	III	4,84	III	4,76	III	4,82	III
157.	Kodya Jakarta Utara	3,85	III	4,87	III	4,85	III	2,65	I	4,04	III
158.	Bogor	2,80	I	3,01	I	2,94	I	2,84	I	3,15	I
159.	Sukabumi	2,77	I	3,03	I	2,82	I	3,02	I	3,04	I
160.	Cianjur	2,89	I	3,05	I	3,11	II	3,30	II	3,30	II
161.	Bandung	2,98	I	3,37	II	3,32	II	2,97	I	3,43	II
162.	Garut	2,84	I	2,77	I	3,09	II	2,76	I	3,16	I
163.	Tasikmalaya	3,00	I	3,61	III	3,13	II	3,05	I	3,57	III
164.	Ciamis	2,78	I	3,45	II	3,13	II	3,16	II	3,36	II
165.	Kuningan	2,91	I	3,58	II	3,19	II	3,13	II	3,53	III
166.	Cirebon	2,76	I	3,47	II	3,25	II	3,19	II	3,43	II
167.	Majalengka	2,76	I	3,21	I	3,30	II	3,16	II	3,29	II
168.	Sumedang	2,94	I	3,46	II	3,35	II	2,81	I	3,39	II
169.	Indramayu	2,71	I	3,00	I	3,02	II	3,15	II	3,07	I
170.	Subang	2,90	I	3,62	III	3,15	II	2,97	I	3,51	III
171.	Purwakarta	2,90	I	3,52	II	3,44	III	3,12	II	3,45	II
172.	Karawang	2,92	I	3,67	III	3,62	III	2,81	I	3,61	III
173.	Bekasi	3,23	II	3,65	III	3,47	III	3,15	II	3,64	III
174.	Bandung Barat	3,07	II	3,57	II	3,76	III	3,85	III	3,66	III
175.	Kota Bogor	3,16	II	4,70	III	3,78	III	3,05	I	3,25	II
176.	Kota Sukabumi	3,30	II	3,57	II	3,29	II	4,90	III	3,25	II
177.	Kota Bandung	4,33	III	4,84	III	4,86	III	3,00	I	4,54	III
178.	Kota Cirebon	3,12	II	4,05	III	3,92	III	2,87	I	3,27	II
179.	Kota Bekasi	3,07	II	4,76	III	3,79	III	3,98	III	3,28	II
180.	Kota Depok	3,65	III	3,30	II	3,98	III	3,93	III	3,36	II
181.	Kota Cimahi	3,28	II	3,28	II	3,32	II	3,10	II	3,43	II
182.	Kota Tasikmalaya	3,30	II	4,45	III	3,91	III	2,89	I	3,37	II
183.	Kota Banjar	2,83	I	3,88	III	3,28	II	3,17	II	3,09	I
184.	Pandeglang	2,78	I	3,38	II	3,20	II	3,29	II	3,35	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
185.	Lebak	2,85	I	3,55	II	2,99	I	3,18	II	3,54	III
186.	Tangerang	2,90	I	3,16	I	3,80	III	3,26	II	3,28	II
187.	Serang	2,88	I	3,28	II	2,99	I	3,29	II	3,36	II
188.	Kota Tangerang	3,61	III	4,27	III	3,70	III	4,18	III	3,22	I
189.	Kota Cilegon	3,37	III	4,48	III	4,26	III	3,85	III	3,82	III
190.	Kota Serang	2,81	I	4,28	III	3,68	III	3,76	III	3,50	III
191.	Kota Tangerang Selatan	3,71	III	4,27	III	3,69	III	3,20	II	3,51	III
192.	Cilacap	3,16	II	3,72	III	3,25	II	3,06	I	3,73	III
193.	Banyumas	2,88	I	3,32	II	3,35	II	3,18	II	3,33	II
194.	Purbalingga	2,84	I	3,28	II	3,18	II	3,05	I	3,29	II
195.	Banjarnegara	2,72	I	3,14	I	3,00	II	2,99	I	3,15	I
196.	Kebumen	2,80	I	3,13	I	3,13	II	3,16	II	3,19	I
197.	Purworejo	3,00	I	3,49	II	3,52	III	3,15	II	3,56	III
198.	Wonosobo	2,89	I	3,37	II	3,41	III	2,85	I	3,44	II
199.	Magelang	2,79	I	3,38	II	3,26	II	2,67	I	3,36	II
200.	Boyolali	2,85	I	3,01	I	3,05	II	3,00	I	3,17	I
201.	Klaten	3,08	II	3,02	I	3,08	II	3,02	I	3,30	II
202.	Sukoharjo	2,89	I	3,26	II	3,13	II	2,86	I	3,28	II
203.	Wonogiri	2,81	I	3,00	I	2,81	I	3,02	I	3,05	I
204.	Karanganyar	2,87	I	3,34	II	3,34	II	2,66	I	3,35	II
205.	Sragen	2,85	I	3,19	I	3,20	II	2,76	I	3,25	II
206.	Grobogan	3,34	III	3,45	II	3,24	II	2,73	I	3,54	III
207.	Blora	2,87	I	3,13	I	2,88	I	3,14	II	3,18	I
208.	Rembang	2,89	I	3,39	II	3,22	II	2,79	I	3,37	II
209.	Pati	2,83	I	3,26	II	3,09	II	3,07	II	3,27	II
210.	Kudus	3,39	III	3,65	III	3,40	III	3,13	II	3,67	III
211.	Jepara	3,02	I	3,38	II	3,30	II	3,09	II	3,42	II
212.	Demak	2,90	I	3,07	I	3,36	II	3,18	II	3,28	II
213.	Semarang	2,92	I	3,31	II	3,28	II	2,90	I	3,33	II
214.	Temanggung	2,99	I	3,28	II	3,20	II	3,03	I	3,27	II
215.	Kendal	3,06	II	3,49	II	3,15	II	3,07	II	3,49	III
216.	Batang	2,79	I	3,20	I	3,00	I	3,14	II	3,19	I
217.	Pekalongan	2,98	I	3,29	II	2,87	I	3,17	II	3,31	II
218.	Pemalang	2,93	I	3,16	I	2,93	I	2,85	I	3,20	I
219.	Tegal	2,96	I	3,02	I	3,00	I	2,83	I	3,07	I
220.	Brebes	3,09	II	2,86	I	3,28	II	2,90	I	3,08	I
221.	Kota Magelang	3,28	II	3,85	III	3,85	III	4,62	III	3,17	I
222.	Kota Surakarta	3,29	II	4,27	III	3,66	III	2,69	I	3,02	I
223.	Kota Salatiga	3,29	II	3,76	III	3,84	III	3,87	III	3,09	I
224.	Kota Semarang	3,29	II	4,29	III	3,87	III	3,72	III	3,20	I
225.	Kota Pekalongan	3,16	II	4,29	III	3,71	III	2,89	I	3,29	II
226.	Kota Tegal	3,28	II	3,92	III	3,86	III	3,03	I	3,14	I
227.	Kulon Progo	3,02	I	3,12	I	3,07	II	3,06	II	3,29	II
228.	Bantul	2,90	I	3,48	II	3,28	II	2,75	I	3,46	II
229.	Gunung Kidul	2,84	I	3,29	II	3,10	II	3,02	I	3,28	II
230.	Sleman	3,34	III	3,65	III	3,31	II	4,21	III	3,70	III
231.	Kota Yogyakarta	3,53	III	4,29	III	3,69	III	3,01	I	3,37	II
232.	Pacitan	2,84	I	3,22	I	3,11	II	3,13	II	3,29	II
233.	Ponorogo	2,90	I	3,29	II	3,16	II	3,04	I	3,34	II
234.	Trenggalek	2,84	I	3,36	II	3,06	II	3,15	II	3,33	II
235.	Tulungagung	2,85	I	3,17	I	2,92	I	3,00	I	3,19	I
236.	Blitar	2,93	I	3,11	I	3,13	II	3,12	II	3,22	I
237.	Kediri	2,83	I	3,27	II	3,20	II	2,79	I	3,29	II
238.	Malang	2,86	I	2,76	I	3,05	II	3,00	I	3,22	I
239.	Lumajang	2,90	I	3,50	II	3,15	II	3,00	I	3,46	II
240.	Jember	2,89	I	3,43	II	3,23	II	3,03	I	3,42	II
241.	Banyuwangi	2,89	I	3,33	II	3,16	II	3,22	II	3,44	II
242.	Bondowoso	2,90	I	3,61	III	3,27	II	3,03	I	3,47	II
243.	Situbondo	2,93	I	3,53	II	3,15	II	2,89	I	3,50	III
244.	Probolinggo	2,84	I	3,50	II	3,34	II	2,93	I	3,33	II
245.	Pasuruan	2,85	I	3,51	II	3,31	II	2,98	I	3,44	II
246.	Sidoarjo	3,40	III	3,63	III	3,15	II	2,88	I	3,67	III

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kate-gori	ICOR	Kate-gori	ICOR	Kate-gori	ICOR	Kate-gori	ICOR	Kate-gori
247.	Mojokerto	2,85	I	3,34	II	3,34	II	3,03	I	3,37	II
248.	Jombang	2,85	I	3,29	II	3,13	II	3,00	I	3,31	II
249.	Nganjuk	2,86	I	3,38	II	3,35	II	2,77	I	3,39	II
250.	Madiun	2,85	I	3,34	II	3,25	II	3,02	I	3,38	II
251.	Magetan	2,83	I	3,23	II	2,94	I	2,87	I	3,21	I
252.	Ngawi	2,88	I	3,19	I	3,15	II	2,87	I	3,24	I
253.	Bojonegoro	2,83	I	3,55	II	3,08	II	2,78	I	3,40	II
254.	Tuban	2,96	I	3,58	II	3,16	II	3,09	II	3,53	III
255.	Lamongan	3,08	II	3,66	III	3,32	II	3,07	II	3,66	III
256.	Gresik	3,15	II	3,82	III	3,30	II	2,99	I	3,72	III
257.	Bangkalan	2,83	I	3,17	I	2,85	I	3,03	I	3,18	I
258.	Sampang	2,80	I	3,42	II	3,10	II	3,00	I	3,46	II
259.	Pamekasan	2,82	I	3,09	I	3,04	II	3,13	II	3,16	I
260.	Sumenep	2,91	I	3,10	I	3,28	II	3,20	II	3,18	I
261.	Kota Kediri	3,03	I	3,10	I	3,77	III	2,66	I	3,22	I
262.	Kota Blitar	3,29	II	4,29	III	3,87	III	3,93	III	3,16	I
263.	Kota Malang	3,57	III	4,01	III	3,89	III	3,15	II	3,48	III
264.	Kota Probolinggo	3,82	III	3,77	III	3,88	III	2,96	I	3,94	III
265.	Kota Pasuruan	3,29	II	3,92	III	3,79	III	2,98	I	3,15	I
266.	Kota Mojokerto	3,30	II	3,30	II	3,90	III	3,09	II	3,20	I
267.	Kota Madiun	3,29	II	3,29	II	3,92	III	4,09	III	3,27	II
268.	Kota Surabaya	3,30	II	4,43	III	3,89	III	3,03	I	3,30	II
269.	Kota Batu	3,16	II	3,38	II	3,66	III	3,17	II	3,48	III
270.	Sambas	3,33	III	3,55	II	2,88	I	3,53	III	3,54	III
271.	Bengkayang	2,93	I	3,26	II	2,97	I	3,32	II	3,35	II
272.	Landak	2,92	I	3,19	I	3,17	II	3,40	III	3,32	II
273.	Pontianak	2,95	I	3,12	I	2,86	I	3,28	II	3,25	II
274.	Sanggau	2,96	I	3,42	II	3,34	II	3,31	II	3,48	III
275.	Ketapang	3,44	III	3,58	II	3,15	II	3,14	II	3,69	III
276.	Sintang	3,10	II	3,41	II	3,32	II	3,34	II	3,47	II
277.	Kapuas Hulu	3,37	III	3,57	II	3,23	II	3,36	II	3,61	III
278.	Sekadau	2,94	I	3,25	II	2,96	I	3,41	III	3,37	II
279.	Melawi	2,93	I	3,11	I	2,86	I	3,44	III	3,26	II
280.	Kayong Utara	2,92	I	3,05	I	2,89	I	3,38	II	3,25	II
281.	Kubu Raya	3,81	III	3,29	II	3,18	II	3,49	III	4,07	III
282.	Kota Pontianak	3,81	III	3,18	I	3,74	III	3,14	II	3,63	III
283.	Kota Singkawang	3,22	II	3,14	I	3,75	III	3,54	III	3,44	II
284.	Kotawaringin Barat	3,04	I	3,41	II	3,28	II	3,64	III	3,52	III
285.	Kotawaringin Timur	2,95	I	3,68	III	3,25	II	3,57	III	3,63	III
286.	Kapuas	3,06	I	3,50	II	3,09	II	3,60	III	3,49	III
287.	Barito Selatan	3,31	II	3,50	II	3,21	II	3,17	II	3,56	III
288.	Barito Utara	3,31	II	3,49	II	3,32	II	3,18	II	3,60	III
289.	Sukamara	3,14	II	3,26	II	3,02	II	3,29	II	3,32	II
290.	Lamandau	3,03	I	3,25	II	3,23	II	3,38	II	3,37	II
291.	Seruyan	3,04	I	3,39	II	3,46	III	3,48	III	3,49	III
292.	Katingan	3,12	II	3,35	II	2,82	I	3,33	II	3,37	II
293.	Pulang Pisau	3,01	I	3,30	II	2,93	I	3,37	II	3,32	II
294.	Gunung Mas	3,02	I	3,24	II	3,18	II	3,10	II	3,36	II
295.	Barito Timur	3,17	II	3,52	II	3,33	II	3,23	II	3,56	III
296.	Murung Raya	2,96	I	2,96	I	2,88	I	3,79	III	3,20	I
297.	Kota Palangka Raya	3,36	III	3,14	I	3,59	III	3,53	III	3,45	II
298.	Tanah Laut	3,16	II	3,53	II	3,26	II	3,66	III	3,55	III
299.	Kotabaru	3,19	II	3,78	III	3,45	III	3,27	II	3,68	III
300.	Banjar	3,14	II	3,68	III	3,49	III	3,56	III	3,67	III
301.	Barito Kuala	2,92	I	3,40	II	3,20	II	3,56	III	3,45	II
302.	Tapin	3,20	II	3,42	II	3,04	II	3,27	II	3,47	II
303.	Hulu Sungai Selatan	3,06	II	3,43	II	3,38	II	3,26	II	3,54	III
304.	Hulu Sungai Tengah	2,98	I	3,15	I	3,04	II	3,10	II	3,27	II
305.	Hulu Sungai Utara	3,10	II	3,14	I	2,97	I	3,81	III	3,28	II
306.	Tabalong	3,53	III	3,53	II	3,49	III	3,47	III	3,75	III
307.	Tanah Bumbu	3,00	I	3,19	I	2,90	I	3,30	II	3,31	II
308.	Balangan	3,00	I	3,15	I	2,91	I	3,93	III	3,29	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
309.	Kota Banjarmasin	3,24	II	4,30	III	4,00	III	3,29	II	3,54	III
310.	Kota Banjarbaru	3,29	II	3,86	III	3,80	III	3,36	II	3,15	I
311.	Pasir	3,34	III	3,42	II	3,06	II	3,43	III	3,47	II
312.	Kutai Barat	3,42	III	3,35	II	2,92	I	2,91	I	3,44	II
313.	Kutai Kartanegara	2,97	I	2,96	I	2,91	I	2,84	I	3,10	I
314.	Kutai Timur	2,96	I	3,02	I	2,88	I	3,59	III	3,12	I
315.	Berau	3,30	II	3,45	II	3,04	II	3,13	II	3,51	III
316.	Malinau	3,44	III	3,25	II	2,86	I	3,37	II	3,36	II
317.	Bulungan	3,20	II	3,19	I	2,73	I	3,37	II	3,30	II
318.	Nunukan	3,31	II	3,26	II	2,85	I	3,33	II	3,32	II
319.	Penajam Paser Utara	3,67	III	3,49	II	2,91	I	3,13	II	3,53	III
320.	Tana Tidung	3,36	III	2,99	I	2,80	I	3,76	III	3,27	II
321.	Kota Balikpapan	3,28	II	3,22	II	3,88	III	4,21	III	3,44	II
322.	Kota Samarinda	3,48	III	4,54	III	3,76	III	3,13	II	3,67	III
323.	Kota Tarakan	3,30	II	3,09	I	2,90	I	3,28	II	3,19	I
324.	Kota Bontang	3,29	II	3,30	II	3,29	II	3,72	III	3,14	I
325.	Bolaang Mongondow	3,40	III	3,51	II	2,86	I	3,13	II	3,54	III
326.	Minahasa	2,95	I	3,36	II	3,03	II	3,61	III	3,31	II
327.	Kepulauan Sangihe	3,39	III	3,53	II	2,85	I	3,69	III	3,53	III
328.	Kepulauan Talaud	3,43	III	3,42	II	2,89	I	3,49	III	3,54	III
329.	Minahasa Selatan	3,27	II	3,39	II	2,70	I	3,41	III	3,40	II
330.	Minahasa Utara	3,29	II	3,44	II	2,85	I	3,52	III	3,49	III
331.	Bolaang Mongondow Utara	3,49	III	3,38	II	2,82	I	3,04	I	3,47	II
332.	Siau Tagulandang Biaro	3,05	I	2,93	I	2,71	I	3,18	II	3,11	I
333.	Minahasa Tenggara	2,97	I	3,15	I	2,76	I	3,07	II	3,19	I
334.	Bolaang Mongondow Selatan	3,10	II	3,11	I	2,82	I	3,13	II	3,20	I
335.	Bolaang Mongondow Timur	3,25	II	3,19	I	2,87	I	4,18	III	3,33	II
336.	Kota Manado	3,69	III	3,27	II	3,82	III	3,13	II	3,54	III
337.	Kota Bitung	3,29	II	3,29	II	3,84	III	3,03	I	3,18	I
338.	Kota Tomohon	2,85	I	3,27	II	3,28	II	3,29	II	3,05	I
339.	Kota Kotamobagu	3,30	II	3,28	II	3,27	II	3,46	III	3,09	I
340.	Boalemo	3,01	I	3,21	I	2,98	I	3,27	II	3,33	II
341.	Gorontalo	2,96	I	3,41	II	3,38	II	3,49	III	3,47	II
342.	Pohuwato	3,24	II	3,42	II	3,20	II	3,70	III	3,52	III
343.	Bone Bolango	3,01	I	3,37	II	2,89	I	3,15	II	3,41	II
344.	Gorontalo Utara	3,20	II	3,58	II	3,01	II	3,28	II	3,50	III
345.	Kota Gorontalo	3,06	I	3,88	III	3,29	II	3,25	II	3,17	I
346.	Banggai Kepulauan	3,00	I	2,95	I	2,92	I	3,50	III	3,21	I
347.	Banggai	3,09	II	3,29	II	3,00	I	3,79	III	3,41	II
348.	Morowali	3,60	III	3,37	II	2,86	I	3,75	III	3,60	III
349.	Poso	3,03	I	3,47	II	3,16	II	3,25	II	3,52	III
350.	Donggala	3,28	II	3,39	II	3,10	II	3,83	III	3,53	III
351.	Toli-Toli	3,36	III	3,58	II	2,99	I	3,28	II	3,61	III
352.	Buol	2,99	I	3,04	I	2,94	I	3,55	III	3,15	I
353.	Parigi Moutong	3,31	II	3,65	III	3,05	II	3,50	III	3,57	III
354.	Tojo Una-Una	3,03	I	3,25	II	2,78	I	3,28	II	3,32	II
355.	Sigi	3,39	III	3,64	III	3,00	I	3,32	II	3,62	III
356.	Kota Palu	3,71	III	3,64	III	3,81	III	3,53	III	3,60	III
357.	Kepulauan Selayar	3,30	II	3,45	II	3,00	I	3,19	II	3,48	III
358.	Bulukumba	3,28	II	3,48	II	2,80	I	3,15	II	3,47	II
359.	Bantaeng	3,38	III	3,64	III	3,01	II	3,03	I	3,55	III
360.	Jeneponto	3,48	III	3,50	II	3,32	II	3,14	II	3,67	III
361.	Takalar	3,25	II	3,30	II	2,90	I	3,15	II	3,38	II
362.	Gowa	3,12	II	3,13	I	3,02	II	3,15	II	3,37	II
363.	Sinjai	3,44	III	3,48	II	3,00	II	3,15	II	3,52	III
364.	Maros	3,34	III	3,50	II	3,00	II	3,16	II	3,51	III
365.	Pangkajene dan Kepulauan	3,40	III	3,68	III	3,33	II	3,24	II	3,65	III
366.	Barru	3,47	III	3,57	II	3,19	II	3,14	II	3,60	III
367.	Bone	3,17	II	3,37	II	2,84	I	3,33	II	3,36	II
368.	Soppeng	3,13	II	3,30	II	2,95	I	3,18	II	3,34	II
369.	Wajo	3,08	II	3,54	II	2,89	I	3,24	II	3,39	II
370.	Sidenreng Rappang	3,19	II	3,44	II	2,94	I	3,25	II	3,38	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
371.	Pinrang	3,04	I	3,67	III	3,36	II	3,16	II	3,51	III
372.	Enrekang	3,41	III	3,69	III	2,84	I	3,18	II	3,57	III
373.	Luwu	3,07	II	3,64	III	3,14	II	3,14	II	3,59	III
374.	Tana Toraja	3,23	II	3,37	II	2,86	I	3,02	I	3,37	II
375.	Luwu Utara	3,12	II	3,53	II	2,81	I	3,18	II	3,44	II
376.	Luwu Timur	3,47	III	3,74	III	3,19	II	3,19	II	3,69	III
377.	Toraja Utara	3,40	III	3,77	III	2,93	I	3,91	III	3,63	III
378.	Kota Makassar	3,43	III	4,62	III	4,00	III	3,23	II	3,69	III
379.	Kota Pare-Pare	3,36	III	3,24	II	3,29	II	3,41	III	3,27	II
380.	Kota Palopo	3,45	III	3,78	III	3,55	III	3,18	II	3,51	III
381.	Majene	3,51	III	3,35	II	3,45	III	3,49	III	3,62	III
382.	Polewali Mandar	3,25	II	3,68	III	2,75	I	3,14	II	3,47	II
383.	Mamasa	3,23	II	3,27	II	2,77	I	3,48	III	3,29	II
384.	Mamuju	3,47	III	3,65	III	2,83	I	3,40	III	3,55	III
385.	Mamuju Utara	3,31	II	3,35	II	2,76	I	3,03	I	3,37	II
386.	Buton	3,09	II	3,18	I	2,96	I	2,91	I	3,23	I
387.	Muna	3,09	II	3,19	I	2,88	I	2,94	I	3,19	I
388.	Konawe	2,94	I	3,07	I	2,72	I	3,00	I	3,09	I
389.	Kolaka	3,67	III	3,50	II	3,33	II	3,14	II	3,56	III
390.	Konawe Selatan	3,22	II	3,48	II	3,11	II	3,45	III	3,47	II
391.	Bombana	3,07	II	3,39	II	2,87	I	3,14	II	3,37	II
392.	Wakatobi	3,12	II	3,16	I	2,89	I	3,27	II	3,25	II
393.	Kolaka Utara	3,13	II	3,54	II	3,04	II	3,36	II	3,51	III
394.	Buton Utara	2,99	I	3,18	I	2,92	I	3,35	II	3,29	II
395.	Konawe Utara	3,00	I	3,09	I	2,81	I	3,16	II	3,23	I
396.	Kota Kendari	3,28	II	4,33	III	3,30	II	3,38	II	3,22	I
397.	Kota Bau-Bau	3,31	II	3,08	I	3,28	II	3,34	II	3,25	II
398.	Jembrana	3,01	I	3,29	II	3,07	II	3,39	II	3,35	II
399.	Tabanan	3,10	II	3,43	II	2,97	I	2,95	I	3,38	II
400.	Badung	3,14	II	3,49	II	3,13	II	3,13	II	3,50	III
401.	Gianyar	3,23	II	3,44	II	3,17	II	2,95	I	3,40	II
402.	Klungkung	3,23	II	3,20	I	2,91	I	2,99	I	3,25	II
403.	Bangli	3,25	II	3,38	II	3,12	II	2,84	I	3,35	II
404.	Karang Asem	2,83	I	3,10	I	3,00	I	2,92	I	3,12	I
405.	Buleleng	2,86	I	3,21	I	2,87	I	4,14	III	3,19	I
406.	Kota Denpasar	3,26	II	4,36	III	2,98	I	3,14	II	3,40	II
407.	Lombok Barat	3,49	III	3,56	II	3,11	II	3,03	I	3,54	III
408.	Lombok Tengah	3,14	II	3,47	II	3,18	II	3,04	I	3,43	II
409.	Lombok Timur	3,22	II	3,50	II	3,18	II	3,13	II	3,45	II
410.	Sumbawa	3,26	II	3,49	II	2,89	I	3,11	II	3,39	II
411.	Dompu	3,23	II	3,25	II	3,22	II	3,04	I	3,37	II
412.	Bima	3,28	II	3,62	III	2,98	I	3,15	II	3,48	III
413.	Sumbawa Barat	3,77	III	3,80	III	3,31	II	3,15	II	3,83	III
414.	Lombok Utara	2,92	I	3,31	II	2,81	I	3,37	II	3,32	II
415.	Kota Mataram	3,48	III	3,59	III	3,95	III	3,33	II	3,68	III
416.	Kota Bima	3,42	III	3,34	II	3,30	II	3,13	II	3,44	II
417.	Sumba Barat	3,32	III	3,51	II	2,98	I	3,40	III	3,49	III
418.	Sumba Timur	3,46	III	3,37	II	3,00	I	3,50	III	3,49	III
419.	Kupang	3,41	III	3,51	II	3,11	II	3,31	II	3,55	III
420.	Timor Tengah Selatan	3,24	II	3,46	II	2,99	I	3,03	I	3,41	II
421.	Timor Tengah Utara	3,11	II	3,36	II	2,99	I	3,39	II	3,37	II
422.	Belu	3,48	III	3,44	II	2,98	I	3,32	II	3,50	III
423.	Alor	3,10	II	3,25	II	2,89	I	3,24	II	3,31	II
424.	Lembata	3,05	I	3,18	I	3,27	II	3,41	III	3,26	II
425.	Flores Timur	3,31	II	3,55	II	2,92	I	3,37	II	3,48	II
426.	Sikka	3,21	II	3,51	II	2,98	I	3,28	II	3,44	II
427.	Ende	3,21	II	3,51	II	3,44	III	3,01	I	3,52	III
428.	Ngada	3,10	II	3,36	II	3,11	II	3,33	II	3,38	II
429.	Manggarai	3,00	I	3,30	II	2,95	I	3,15	II	3,31	II
430.	Rote Ndao	3,31	II	3,61	III	3,08	II	3,36	II	3,55	III
431.	Manggarai Barat	2,97	I	3,23	II	2,94	I	3,29	II	3,30	II
432.	Sumba Tengah	3,15	II	3,21	I	3,07	II	3,15	II	3,27	II

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
433.	Sumba Barat Daya	3,16	II	3,25	II	3,03	II	3,06	II	3,31	II
434.	Nagekeo	3,28	II	3,27	II	3,04	II	2,94	I	3,33	II
435.	Manggarai Timur	2,99	I	3,04	I	2,85	I	2,76	I	3,12	I
436.	Sabu Raijua	3,13	II	3,03	I	2,82	I	3,28	II	3,13	I
437.	Kota Kupang	3,31	II	3,19	I	3,79	III	3,04	I	3,25	II
438.	Maluku Tenggara Barat	2,94	I	2,98	I	2,94	I	3,28	II	3,15	I
439.	Maluku Tenggara	2,92	I	2,91	I	2,91	I	3,00	I	3,06	I
440.	Maluku Tengah	3,38	III	3,28	II	3,02	II	2,92	I	3,34	II
441.	Buru	3,21	II	3,07	I	2,98	I	3,14	II	3,22	I
442.	Kepulauan Aru	3,17	II	3,06	I	2,82	I	3,12	II	3,22	I
443.	Seram Bagian Barat	3,08	II	3,03	I	3,08	II	3,00	I	3,24	I
444.	Seram Bagian Timur	3,10	II	3,13	I	2,87	I	3,28	II	3,21	I
445.	Maluku Barat Daya	3,00	I	2,98	I	3,03	II	3,28	II	3,14	I
446.	Buru Selatan	3,10	II	3,29	II	2,86	I	3,29	II	3,14	I
447.	Kota Ambon	3,30	II	3,29	II	3,68	III	3,28	II	3,12	I
448.	Kota Tual	3,21	II	3,17	I	3,27	II	3,28	II	3,12	I
449.	Halmahera Barat	3,16	II	3,04	I	2,82	I	3,28	II	3,15	I
450.	Halmahera Tengah	3,22	II	3,15	I	2,83	I	3,28	II	3,20	I
451.	Kepulauan Sula	2,96	I	3,29	II	3,27	II	3,29	II	3,06	I
452.	Halmahera Selatan	3,42	III	3,26	II	2,80	I	3,00	I	3,28	II
453.	Halmahera Utara	3,46	III	3,36	II	2,89	I	3,28	II	3,37	II
454.	Halmahera Timur	2,95	I	2,90	I	2,77	I	3,28	II	3,02	I
455.	Pulau Morotai	2,97	I	3,29	II	2,78	I	3,11	II	3,07	I
456.	Kota Ternate	3,33	III	3,67	III	3,29	II	3,28	II	3,41	II
457.	Kota Tidore Kepulauan	3,29	II	3,29	II	3,27	II	3,30	II	3,05	I
458.	Merauke	3,23	II	4,39	III	3,23	II	3,30	II	3,44	II
459.	Jayawijaya	3,34	III	3,21	I	3,22	II	3,26	II	3,36	II
460.	Jayapura	3,77	III	3,43	II	3,06	II	3,65	III	3,57	III
461.	Nabire	4,18	III	3,70	III	3,35	II	3,37	II	3,90	III
462.	Kepulauan Yapen	3,15	II	3,09	I	3,10	II	3,22	II	3,27	II
463.	Biak Numfor	3,60	III	3,44	II	3,30	II	3,34	II	3,51	III
464.	Paniai	3,27	II	3,20	I	3,28	II	3,39	II	3,35	II
465.	Puncak Jaya	3,29	II	3,08	I	3,44	III	3,30	II	3,34	II
466.	Mimika	3,41	III	3,27	II	3,18	II	3,05	I	3,39	II
467.	Boven Digoel	3,74	III	3,52	II	3,15	II	3,12	II	3,55	III
468.	Mappi	3,49	III	3,17	I	3,97	III	3,43	III	3,42	II
469.	Asmat	3,37	III	3,26	II	3,15	II	3,03	I	3,38	II
470.	Yahukimo	3,31	II	3,06	I	3,29	II	3,46	III	3,28	II
471.	Pegunungan Bintang	3,43	III	3,30	II	3,11	II	3,29	II	3,42	II
472.	Tolikara	3,63	III	4,40	III	3,29	II	3,34	II	3,55	III
473.	Sarmi	3,41	III	3,44	II	3,14	II	3,26	II	3,48	II
474.	Keerom	3,39	III	3,43	II	3,15	II	3,06	II	3,46	II
475.	Waropen	3,26	II	3,06	I	3,14	II	2,90	I	3,28	II
476.	Supiori	3,13	II	3,29	II	3,29	II	3,18	II	3,18	I
477.	Mamberamo Raya	3,24	II	3,18	I	3,30	II	3,03	I	3,30	II
478.	Nduga	3,39	III	3,26	II	3,30	II	3,27	II	3,36	II
479.	Lanny Jaya	3,45	III	3,22	I	3,29	II	3,30	II	3,42	II
480.	Mamberamo Tengah	3,29	II	3,17	I	3,91	III	3,96	III	3,34	II
481.	Yalimo	3,22	II	3,10	I	3,67	III	3,19	II	3,22	I
482.	Puncak	3,15	II	3,08	I	3,40	III	3,28	II	3,26	II
483.	Dogiyai	3,25	II	3,01	I	3,69	III	3,28	II	3,19	I
484.	Intan Jaya	3,24	II	3,14	I	3,79	III	3,29	II	3,24	I
485.	Deiyai	3,33	III	3,83	III	3,77	III	3,64	III	3,31	II
486.	Kota Jayapura	4,01	III	4,37	III	3,39	II	3,60	III	3,84	III
487.	Fakfak	3,79	III	3,47	II	3,44	III	3,18	II	3,57	III
488.	Kaimana	3,72	III	3,42	II	3,22	II	3,28	II	3,55	III
489.	Teluk Wondama	3,33	III	3,28	II	3,67	III	3,67	III	3,19	I
490.	Teluk Bintuni	3,50	III	3,05	I	3,28	II	3,30	II	3,24	I
491.	Manokwari	3,43	III	3,12	I	3,71	III	3,29	II	3,30	II
492.	Sorong Selatan	3,05	I	2,98	I	3,14	II	3,00	I	3,15	I
493.	Sorong	3,44	III	4,40	III	3,15	II	3,25	II	3,46	II
494.	Raja Ampat	3,15	II	3,15	I	3,84	III	3,15	II	3,22	I

Lampiran 1. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Tan. pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Pertanian	
		ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori	ICOR	Kategori
495.	Tambrau	3,48	III	3,19	I	3,11	II	3,46	III	3,40	II
496.	Maybrat	3,27	II	3,07	I	3,73	III	3,23	II	3,25	II
497.	Kota Sorong	3,48	III	4,39	III	3,29	II	3,23	II	3,49	III

Keterangan: Kategori I = efisiensi relatif tinggi, II = efisiensi sedang, III = efisiensi relatif rendah